

CALEP

catatan lepas
kebudayaan

I Nyoman Yoga Segara



wartam plus

CALEP
catatan lepas
kebudayaan

CALEP

catatan lepas kebudayaan

I Nyoman Yoga Segara



wartamplus





Calep
catatan lepas kebudayaan
I Nyoman Yoga Segara

Cover Design : Agusita Pendetia
Lay Out : M Setia, N Bakti

Cetakan 1, April 2019
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit Wartamplus
Jln. Nangka Selatan 29 A Denpasar Bali
Email : wartammu@yahoo.co.id

ISBN. 978- 602-6740-23-6

Isi diluar tanggung jawab Perc. Mabhakti

Pengantar Penerbit

Memang sudah banyak penulis memberi komentar sambil mengkritisi alam Bali dari konteks maupun kontennya. Keindahannya, adat istiadat, agama, budaya, hingga halhal spiritual, bahkan dunia maya-maya-*dunia tan hana*. Dari *Island of Bali*, Miguel Covarrubias, *Revoult in Paradise*, Ketut Tantri, juga *Seni Lukis Bali dalam tiga generasi*, G.M Sudarta, Kompas. Hampir semua mencatat, '*Bali, magical Island*'. Kendati pulau 'magic' ini, kini sedang terpeleset ditengah kutub-kutub berlawanan. Modernisasi, tradisi, komersialisi, kapitalisi, komodifikasi hingga gengsi. Namun hal ini malah menjadi magnet berikutnya.

Kalau magnet itu membuat seorang Yoga Segara, Antropolog Bali, melakukan otokritik tentang Bali, lewat catatan lepas (Calep), buat penerbit itulah yang unik dan menarik. Ibarat seorang pengemudi memandang ke depan dengan kaca spion kecil di atas kemudi. Menjadikan catatan lepas sebagai rekaman realita apa adanya namun membawa pesan yang sangat istimewa. Pesan-pesan unik dengan makna istimewa itulah yang membuat buku ini harus diterbitkan, paling tidak untuk memperkaya rasa, bahwa Bali memang Bali, dan akan tetap Bali. Selamat membaca!
(wp-esbe)

Kata Pengantar

Dr. Purwadi Soeriadiredja

Antropolog Universitas Udayana

*M*ungkin sudah sangat banyak berbagai tulisan yang mengungkapkan tentang keindahan alam, tradisi, adat istiadat dan kemegahan budaya Bali sebagai sebuah kawasan yang paling “istimewa” dilanda industri pariwisata di republik tercinta ini. Bagi saya pribadi, ada kalanya terasa jenuh melihat suatu realita gerak perubahan, pergeseran nilai dan norma yang terjadi di beberapa dekade belakangan ini. Sepertinya Bali ini mau dibawa kemana *sih*? Tapi, apa mau dikata, itulah Bali, dengan kedinamisan kehidupan sosial dan budayanya.

Setelah membaca naskah buku karya I Nyoman Yoga Segara ini, sebagai seorang putra Bali yang bisa dibilang sudah sepanjang hidupnya mengamati dan menghayati budaya Bali, saya secara pribadi terkesan juga. Ada hal yang tidak biasa dalam karya tulisnya, dalam arti dia melihat dari sudut pandang “lain” dalam mengkritisi hidup keseharian orang Bali. Kegundahan seorang “*native anthropologist*” dalam memandang fenomena sosial-budaya yang mengalami perubahan di sekitarnya. Misalnya, dalam “rasa beragama” orang Bali yang baginya mempunyai wajah ganda, mempesona sekaligus menyeramkan. Bagi sebagian orang dijalani biasa saja dengan penuh ikhlas. Namun bagi sebagian lagi dilakukan berlebihan dengan kepatuhan yang membabi buta yang akan menghasilkan pandangan sempit di luar

nalar akal sehat. Tak heran karenanya emosi keagamaan bisa dikapitalisasi untuk meraih dominasi. Apakah memang demikian? Bukankah wajah ganda itu dari “zaman kapan tahu” sudah melekat, mendarah daging dalam kehidupan manusia? Hitam-putih, atas-bawah, kiri-kanan, laki-perempuan, gelap-terang, susah-senang, baik-buruk, dan sebagainya menurut kategori *binary opposition* di alam semesta ini. Seperti dikemukakan oleh penulis, bahwa dualitas antara yang sakral dan profan akan menyatu lalu berpisah, dan menyatu lagi. Begitu seterusnya, seperti siklus.

Memang tidak sesederhana itu. Hidup keseharian manusia penuh dengan dinamika. Setiap gerak budaya manusia mempunyai strateginya sendiri dalam berkontestasi dan bernegosiasi menghadapi berbagai permasalahan. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan manusia di dunia ini. Selalu ada tarik ulur dalam merajut benang-benang kehidupan itu. Demikian pula keberlangsungan hubungan antarwarga Bali dalam kurun waktu yang lama telah mengalami pasang surut. Seperti diketahui setiap warga atau kelompok dalam suatu masyarakat akan mempunyai kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi. Dalam pemenuhan kepentingan itu mungkin harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Suatu hal yang tadinya dianggap “sakral” oleh sebagian warga masyarakat, kini menjadi “profan” atau “agak profan” dikomodifikasi untuk kepentingan industri pariwisata. Apakah hal itu salah? Mungkin masyarakat Bali “zaman now” sudah lebih pragmatis, dalam arti lebih realistis menghadapi kehidupan. Adanya berbagai kemewahan semu, kemegahan abstrak, komodifikasi upacara dengan berbagai ikutannya, sudah menjadi hidup keseharian orang Bali.

Di dalam kegundahannya, Yoga Segara bukan orang yang anti perubahan, bukan yang tradisional-tradisional amat, dengan

analisis sosio antropologisnya dia ingin melihat suatu perubahan yang wajar dan berakar pada norma dan nilai-nilai yang berlaku pada budayanya. Baginya, orang Bali tak bisa hidup individual dalam arti yang sebenarnya. Di manapun, kapan pun, mereka akan mencari kelompoknya. Entah berdasarkan desa asalnya maupun *soroh* atau klennya. Bahkan di luar Bali sekalipun, mereka akan membangun pura umum dengan *padmasana*, membuat *tempek*, *banjar* dan *pasraman*. Identitas desa asal maupun *soroh* terasa kental sekali. Bali tetap Bali, dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Proses pembentukan identitas merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam mengkaji dinamika pembentukan identitas budaya orang Bali tidak dapat hanya difokuskan pada kehidupan mereka sebagai individu atau kelompok saja. Pada kenyataannya ada hal-hal lain yang juga mempengaruhi sehingga proses pembentukan identitasnya menjadi lebih kompleks lagi. Tampaknya dengan adanya perubahan atau modernisasi justru memperjelas posisi identitas tersebut. Identitas budaya orang Bali bisa dipahami sebagai bagian dari proses sosial dan sejarah, yaitu sesuatu yang dikonstruksikan dan ditransformasikan sebagai hasil dari interaksi. Dapat dikatakan bahwa identitas terkonstruksi secara sosial yang terbentuk dari interaksi antara hidup keseharian yang dialami oleh masyarakat bersangkutan dengan “dunia luar”, yang pada gilirannya membentuk *compromised identity* mereka yang baru.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, buku ini menarik untuk dibaca, selain mengandung banyak informasi terbaru tentang ke-Bali-an, juga berguna bagi mereka yang ingin tahu lebih dalam tentang masyarakat dan kebudayaan Bali masa kini yang sedang mengalami perubahan.

Denpasar, 16 Desember 2018.

Ucapan Terima Kasih

Dengan terbitnya buku ini, saya mengucapkan terimakasih kepada, terutama (alm) Iwan Tjitradjaja, Ph.D., dan (alm) Prof. Achmad Fedyani Saifuddin, Ph.D., dua dari semua guru terbaik saya saat belajar antropologi di UI. Dari keduanya saya belajar tentang manusia dan kebudayaan. Buku ringan ini saya dedikasikan untuk keduanya yang telah tiada. Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada Dr. Purwadi Soeriadiredja, sahabat dan antropolog Universitas Udayana yang telah berkenan memberikan Kata Pengantar buku ini, kartunis Gungun, Penerbit Wartam Plus, dan komunitas “Diskusi Kamisan”. Tak lupa, terima kasih saya haturkan kepada kedua orang tua, I Made Jaya dan Ni Wayan Suni. Ketiga saudara perempuan saya, Ni Wayan Sudiani, Ni Made Sugandi dan Ni Ketut Asih Suryati. Istri saya, Dian Karina-Segara dan kedua lanangku, I Gde Amartya Sattvika Segara dan I Kadek Chaka Sababathi Segara. Terakhir, tapi bukan yang terakhir, puji syukur ke hadapan Tuhan, Sanghyang Paramatma.

Prawacana

Buku ini sebenarnya tidak pernah direncanakan kapan akan selesai. Sebab jika terus ditulis, tiap hari selalu saja ada isu kebudayaan yang menarik. Seperti mozaik, selalu saja ada ritmik, tak pernah pasif, terlebih karakteristik kebudayaan Bali yang tak pernah benar-benar memuncak klimaks. Dalam buku ini, saya mencukupkan hanya mengulik 60 tema saja. Dan apa yang saya nukil ini mungkin juga seperti remah-remah rengginang. Alhasil, tiap tema ditulis tidak berpanjang kalam yang melelahkan mata. Buku ini tak ubahnya seperti bergumam saja, itu pun dalam tarikan nafas tiga paragraf dengan judul yang sengaja dibuat sedikit nakal.

Tak soal apakah hasil gumaman ini diamini atau ditolak. Sebagai sebuah karya ia selalu terbuka untuk didiskusikan lagi. Yang paling serius, menjadi kajian lanjutan. Anggap saja ragam tema dalam buku ini adalah pelenting lahirnya buku serupa lainnya. Dus, 60 tema ini mungkin saja biasa-biasa saja, sebagian lainnya bisa juga tak disadari banyak orang. Beberapa di antaranya malah jarang dituliskan, apalagi menjadi buku. Beberapa intelektual ada yang menuliskannya, tetapi jumlahnya masih minor. Kecuali malah antropolog asing yang banyak menerbitkan penelitiannya tentang Bali. Saya termasuk yang

terinspirasi membukukannya dari sedikit penulis Bali yang menulis Bali.

Dan dalam buku ini, pembaca tidak akan diajak berenang di lautan yang beriak penuh teori kritis, apalagi analisis yang *njelimet*. Sebaliknya, buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan sendiri sebagai bahan renungan. Berbagai tema itu juga hanya didekati dengan sedikit kepekaan yang didapat dari hasil belajar antropologi. Buku ini adalah cara sederhana saya mengabarkan bahwa masih banyak ceruk kebudayaan di sekitar kita yang menyimpan *implicit meaning* untuk diungkap. Tantangan rumit bagi peneliti kualitatif—apalagi berasal dari kebudayaan yang diteliti—karena pekerjaan ini sering membuatnya tidak sensitif, juga tidak objektif. Ini menunjukkan kebudayaan bukanlah *landscape* yang homogen, tapi heterogen. Juga tak akan pernah stabil sejak pertama kali membacanya, menemukan, bahkan setelah lama menyelaminya [*]



Senerai Isi

Pengantar Penerbit	5
Kata Pengantar	6
Ucapan Terimakasih	9
Prawacana	10
Dualitas, Identitas, Ideologi	15
<i>Melis</i> dan bikini sexy, <i>kok</i> bisa?	16
Bolak balik rasa dan rasio	17
Tak ada yang plin -plan <i>dalam “rasa” agama</i>	19
Mengatur rasa di rak lemari	21
<i>Ngalih soroh</i> , apa <i>ngalih</i> rasa nyaman saja?	22
Ajeg Bali, apa kabarmu kini?	23
Syak wasangka dibalik simbol Hindu	26
“Warung 100% Haram”, taktik atau siasat?	28
Orang Bali masih transmigrasi, salah siapa?	30
Ormas di Bali <i>kok</i> makin berotot?	32
KB ala Bali, kebanggaan atau penyesatan?	34
Komodifikasi, Kolektivitas, Pertunjukan	37
Pancoran suci: wisata rohani atau bisnis baru?	38
Komodifikasi <i>banten</i> : kebutuhan atau keinginan? ...	40
Menyederhanakan, bukan menghilangkan, <i>gitu aja kok repot?</i>	42
Kemegahan <i>mekudus</i> dengan “Kori Kardus”	44
“Penjor Lebay” untuk ego yang <i>alay</i>	46

Mendulang gengsi di atas <i>dulang</i>	48
<i>Gebogan</i> atau “mini market” berjalan?	50
<i>Upakara online</i> : tak semudah memesannya	52
Swalayan <i>upakara</i> , bukan masalah murahnya	54
Seikhlas Ekalawya, bisa?	56
<i>Apa gen dadi</i> di Bali	58
<i>Bade</i> beroda: efisiensi atau <i>ngekoh</i> ?	60
Karena dunia makin “mengkerut”	62
<i>Kesinoman</i> digital, mungkinkah?	64
Ritus, untuk apa?	66
Hidup kolektif atau karena tak bisa menyendiri?	68
Ruh wisata Bali, <i>ya budaya dong!</i>	70
Bali tak butuh festival!	72
Perempuan, Kekerabatan, Hirarki	75
Perempuan Bali, siapa menindas siapa?	76
Saat Nateng Dirah geram, berhati-hatilah!	78
Perempuan Bali: mana tubuhmu, mana jiwamu?	80
Kisah klasik, perempuan Bali di simpang jalan!	82
Astika, penebus dosa yang tak normal	84
Suputra itu bukan hanya anak laki <i>lho!</i>	86
Perempuan Hindu itu “sakti”, masih tak percaya? ...	88
Dilema akut perempuan <i>tri wangsa</i>	90
“Kepanesan”, mitos atau fakta?	92
“Melawan mitos” malah dengan <i>mepayas agung</i> ..	94
Delusi, Primordialisme, Dialektika	97
Menjadi <i>Jero</i> itu panggilan hati, gaya hidup, atau menghindari masalah?	98

<i>Speaker Tri Sandhya</i> itu bukan alarm!	100
Budaya bersih di pura, <i>kok sulit amat?</i>	102
<i>Karang Suwung</i> , <i>kok makin suwung?</i>	104
<i>Sigug</i> itu memuji atau menghina <i>sih?</i>	106
Mimikri: meniru atau mengejek?	108
<i>Ngewalek</i> lebih dari sekadar <i>ngorta</i>	110
Multifungsi pura di tanah rantau	112
Harga mahal sebuah kenyamanan di pura	114
Di Jakarta, <i>ida bhatara</i> “saling mengunjungi”	116
Balada Nyepi di tengah kebisingan	118
Ongkos mahal merantau: <i>negen duang banjar</i>	120
Pembinaan, Penyadaran, Pendidikan	123
“Membangun logika dengan logistic”, mengapa tidak?	124
Penyuluh, <i>nyuluhin</i> siapa?	126
UDG rasa “Bali”, itu berita lawas <i>bung!</i>	128
Katanya <i>desa-kala-patra</i> , tapi <i>kok saklek?</i>	130
“Pendidikan hati”, pergilah ke alam!	132
Agar mendidik tak gersang, <i>mesatualah!</i>	134
Mengukur kompetensi jangan kepada I <i>Belogdong!</i>	136
Orang kampus alergi diskusi, gak asyik ah!	138
Penelitian kampus, dunia abu-abu?	140
Purnawacana	142
Senerasi Bacaan	144
Tentang Penulis	148



1

Dualitas,
Identitas,
Ideologi

Melis dan bikini sexy, kok bisa?

Pantai Kuta itu tak indah-indah amat, sebenarnya. Apalagi kini, sampah dan polah pengunjung yang tak sadar lingkungan sering ikut merusak pemandangan. Pasirnya juga tak putih dan bersih. Ombaknya tak cukup memberikan sensasi hebat untuk manuver *surfing*, kalah jauh dari tetangganya, Canggu. Jangan juga dibandingkan dengan ombak Mentawai sana. Tapi tunggu dulu. Saya sudah mampir ke beberapa pantai di Indonesia yang jauh lebih indah dari Kuta. Tapi Kuta selalu sesak, sangat sesak hingga membuat jalanan menuju sana seperti jalur “neraka”. Tapi orang-orang selalu senang ke sana. Berdesakan dan bersesakan, tak soal. Yang penting pernah ke Kuta.

Selain karena faktor Balinya, Kuta juga menjadi pertemuan dua dunia. Penikmat pasir pantai, matahari terbenam, dan riak ombak, larut di pantai legenda ini. Dan saat turis-turis memandikan kulitnya dengan panas matahari, tiba-tiba *pelawatan* dan *pralingga* dari *desa pakraman* di sekitar Kuta datang dengan gamelan bertalu-talu, mereka girang. Ada yang hanya menggunakan bikini, ada juga yang lupa menutup dada. Mereka segera merapat, mengambil foto atau sekadar menonton. Para *pengayah* yang *melis* ke *segara* itu sama sekali tak terusik. *Sungsungan* itu dunia sakral, turis berbikini itu dunia profan, bertemu dalam satu dunia, dunia dualitas.

.....

Pada waktu tertentu, pemandangan seperti itu biasa, tapi di tempat (daerah) lain akan menjadi sangat tak biasa. Mungkin juga akan ditolak keras. Apakah pantai harus steril dari pengunjung atau *penyungsong*, di Kuta dan pantai-pantai lainnya di Bali akan dibiarkan begitu saja. Paling banter Satpam hotel yang “mengusir” pengunjung jika dianggap memasuki zone terlarang. Dualitas antara yang sakral dan profan akan menyatu lalu berpisah, dan menyatu lagi. Begitu seterusnya, seperti siklus. Karena itulah, Kuta akan selalu ramai, dan membikin kangen: melihat turis berbikini sekaligus menonton *upacara melasti* yang sakral. Siapa takut!



Bolak balik rasa dan rasio

Orang Bali kalau *nyulubin* sesuatu yang dianggap kotor, misalnya jemuran, apalagi jemuran pakaian dalam, ia akan merasa tak enak pikiran, bahkan pusing-pusing. Obat sakit kepala dijamin tak akan mempan menyembuhkannya. Biasanya mandi dan keramas akan membuatnya nyaman kembali. Entahlah apa nama penyakit ini. Tak salah, jika sepulang dari *setra* juga harus membasuh kepala. Dulu dengan mengambil air dari dapur karena orang-orang biasanya menyimpan air di *gebeh*. Rasa tak nyaman juga dirasakan jika sehabis sembahyang tak dilanjutkan dengan *nunas tirtha* dan *bija*, terasa ada yang kurang, sembahyang seperti belum sempurna.

Pada masyarakat tradisional, keadaan seperti itu dialami begitu saja. Mereka menjalankan agama dengan rasa yang tak dapat dijelaskan, sekalipun oleh dirinya sendiri. Yang menyebut diri rasional, paling akan mengatakan, “*ah lebay, itu kan hanya pikiran saja*”. Ya sudah. Namun anehnya untuk menemukan, tepatnya mungkin memperjuangkan rasa yang akan membahagiakan pikirannya itu, mereka takkan menghindari sesuatu yang dianggap kotor. Saya menyaksikan sendiri ketika ikut program *tirthayatra* ke Thailand, Nepal dan India pada 2009. Salah satu agendanya mandi di sungai Yamuna.

.....

Menyusuri jalan yang becek dan kumuh, perasaan saya sebenarnya sudah tak karuan. Belum lagi melewati sungai yang airnya kusam dan penuh sampah. Dengan perahu kecil, kami harus berhenti di tengah sungai yang dianggap pusat kesucian, lalu mandi dan menyelam. Air bercampur lumpur tak jadi halangan. Kata *tour guide* kami, Yamuna ini salah satu sungai suci yang bisa membebaskan manusia dari segala dosa. Begitulah “agama rasa”, tak perlu ada perdebatan. Jika pun dipersoalkan, tak jelas kesimpulannya. Remang-remang, tapi nyata.



Tak ada yang plin-plan dalam “rasa” agama

Pada Ngusaba Desa Pakraman Serangan 2018 baru-baru ini, saya memperhatikan beberapa *pengayah* yang sepertinya bekerja tak kenal lelah. Tiap hari, dan 24 jam mereka selalu siaga. Bahkan tak diminta pun, mereka siap memberikan pelayanan sosial. Tak ada honor layaknya pegawai kantoran, apalagi tanda jasa. Sebagian mungkin ada yang *ngayah* karena motif tertentu. Itu biasalah. Dengan *nunas ajengan*, *ngopi*, dan baju seragam, sudah cukup membuat *pengayah* itu senang. Tak ada keruwetan untuk memahami apa yang harus dikerjakan, yang penting bisa *ngaturang ayah*, rejeki usai *ngusaba* bisa dicari. Seperti para *pengayah* itu, beberapa *pemangku* bahkan ada yang tak sempat mengganti baju demi melayani umat. Lusuh, tapi *ngayah* bagi para bhakta seperti ini adalah kesenangan yang tak bisa dijelaskan. Seperti Hanuman melayani Rama. Atmanastuti.

Namun karena “rasa” juga, sebagian orang berlebihan dalam beragama. Tiap hari kerjanya sembahyang dan ke pura. Tempatnya juga harus yang jauh. Kurang afdol kalau hanya di desa atau sekitar Bali. Stok baju putih juga banyak, tak lupa genitri harus dikalungkan biar kelihatan dari jauh. Sikap religius seperti ini pasti tak keliru, bahkan dianjurkan. Sayang, waktu

.....

menyamabraya jadi berkurang, *pisaga* kiri kanan tak dikenal, anak-anak pergaulannya rusak, bahkan ada yang putus sekolah atau kawin muda karena hamil duluan. “Rasa” beragama yang keterlaluan hanya akan mementingkan akhirat, namun berantakan di dunia.

“Rasa” beragama selalu menghasilkan dua sisi, mempesona dan menyeramkan. Bahkan kepatuhan yang membabi buta hanya akan menghasilkan sempit pandangan dan dangkal akal sehat. Karena dua dampak ini, banyak orang pikirannya bisa dikendalikan. Ketika dalam kerumunan massa, untuk unjuk rasa misalnya, status sosial sudah tak penting lagi. Terlebih bangsa ini sering mengalami “amok”, suka mengamuk. Contohnya, dalam pertandingan bola, menang saja rusuh apalagi kalah. Tak aneh, emosi keagamaan bisa dikapitalisasi untuk meraih dominasi. Perhatikanlah, ada ormas yang sukses karena menjual sentimen etnis, ada juga parpol yang berhasil karena memperdagangkan sentimen agama. Siapa yang bisa mengkapitalisasi “rasa” beragama seperti ini akan sukses besar memengaruhi opini publik, meski kadang tak ada jaminan akan terus menang. Tergantung momentumnya juga.



Mengatur “rasa” di rak lemari

“Agama rasa” orang Bali juga ada di lemari pakaiannya. Pikiran mereka distruktur oleh isi laci. Pakaian seperti kaus kaki atau celana dalam bisa dipastikan ditaruh di laci paling bawah. Laci di atasnya biasanya celana dan baju. Jika di atasnya masih ada laci, biasanya pakaian ke pura. Laci paling atas sekali adalah *udeng*, topi dan sesuatu yang diletakkan di kepala. Tak terbayang jika celana dalam akan bercampur dengan *udeng* begitu saja dalam satu laci. “Kiamat kecil” itu.

Struktur pikiran pula membuat mereka juga punya banyak ember. Masing-masing ember memiliki fungsi yang berbeda. Ember untuk mencuci beras dan sayur akan dipisahkan dengan ember untuk mencuci pakaian. Untuk mencuci pakaian atas, seperti *udeng* juga berbeda dengan ember lainnya. Iklan *3 in 1* atau satu ember untuk segala fungsi tak berlaku di Bali.

Kesucian itu diletakkan berbeda atau dibedakan. Hirarki dan struktur juga ditentukan oleh yang suci, dan biasanya kesucian dianggap mengalir dari atas. Konsep *hulu* yang suci, dan *teben* yang kotor bahkan dipraktikkan sejak dari dalam kamar tidur, pekarangan rumah, desa pakraman hingga *pengider jagat*. Mungkin itu sebabnya sebagian orang Bali tak pernah berhenti mengejar yang suci, karena kesucian itu akan membuatnya selalu tampak berbeda. *Ngalih soroh* misalnya.

“Ngalih soroh” apa ngalih rasa nyaman saja?

Dulu, dulu sekali, saat raja menjadi pusat kehidupan orang Bali, semua serba ditata. Tempat tinggal, pakaian, hingga nama orang diatur sesuai hukum kerajaan. Perintah raja adalah *titah dewa*. Tak boleh dilawan, tak bisa dilanggar, karena ia adalah *dewa raja*. Bahkan hanya raja yang boleh mengawini saudara sekandungnya. Konon, jika ada anak-anak kembar buncing lahir di lingkungan *puri* tak dihukum. Tak seperti kembar buncing anak *jaba*, mereka bahkan diasingkan untuk jangka waktu tertentu. Seluruh keistimewaan hanya milik raja, keluarga dan keturunannya kelak.

Di luar (*jaba*) *puri* adalah kotor, di dalam (*jero*) adalah suci. Batas raja dan *panjak* adalah kesucian. Saat kerajaan di Bali mengalami kemunduran, bahkan terpecah-pecah karena peperangan, bukan saja antarkerajaan tetapi juga Belanda. Akibatnya, untuk menyelamatkan diri dan tidak dikenali, beberapa di antaranya *nyineb wangsa*, menjadi rakyat biasa, menjadi *panjak*. saja dulu *disineb* lelulurnya. Tak apa, malah baik karena menunjukkan ketaatan pada *kawitan*, agar tak *kepetengan*. Yang

keliru, jika *soroh* baru dengan nama baru, lalu sengaja tampil beda di masyarakat, apalagi dibuat-buat. Disapa tak menoleh, ditanya tak menyahut. Nama baru yang suci bukan ukuran kualitas manusia, tetapi tindakan-tindakannya. Jadi biarkan saja kehidupan menguji kualitas manusia.



Ajeg Bali, apa kabarmu kini?

Soal isu ini, tentang Ajeg Bali, sudah banyak dibahas. Bahkan sudah ada bukunya. Menyoal kembali, sepertinya akan terasa basi. Tapi masalahnya isu ini terus “hidup”, kadang-kadang mengganggu juga jika sedikit-sedikit Bali merasa terancam, Ajeg Bali seolah menjadi pembenarannya. Bahkan bertindak sedikit keras akan dimaafkan jika atas nama Ajeg Bali. Padahal era eforianya sudah lama berlalu. Ada pro dan kontra mengiringi perjalanannya. Maksud gerakan ini pasti sangat baik, tentu saja. Tak terbantahkan.

Lalu siapa yang ajeg atau semakin ajeg dari gerakan Ajeg Bali? Abstrak. Jika yang dimaksud pemilik media tertentu mendapatkan kejayaan dari gerakan ini, mungkin iya. Tapi kerja media memang begitu. Hidup dari iklan, advertorial, mengejar rating. Ini adalah lapangan empuk bagi media saat Ajeg Bali dilemparkan ke publik. Saat emosi keagamaan dimainkan dengan menyisipkan fanatisme primordial, wacana itu makin membesar. Kapitalisasinya bisa dengan ragam cara, salah satu yang mengais untung besar, ya oleh media, entah cetak, elektronik, massa maupun online.

Sayangnya kini tak ada yang peduli dari ampas-ampas eforia Ajeg Bali itu. Koperasi Simakrama Bali entah bagaimana nasibnya kini. Tak sedikit pedagang Bali gulung tikar saat menjual

.....

bakso ayam dan babi, yang sengaja “diciptakan” hanya untuk mengerem pesatnya kaum urban yang menguasai perbaksoan. Agar rasional, perlu penyedap emosional, misalnya orang Hindu tak makan bakso sapi. Meski kini ditempelkan juga emosi keagamaan dengan *tagline* yang lebih serius, *ajengan sukla*, tetap saja warung-warung itu sunyi. Belum lagi masyarakat yang terbiasa dengan budaya lokalnya “dipaksa” menjual “makanan asing”. Misalnya, orang Klungkung yang terbiasa *mengolah serombotan*, lalu harus menjual soto mie, mie ayam dan sejenisnya. Tak nyambung, dan mereka babak belur. Orang Bali itu budaya makanannya *lawar, babi guling, ares, serombotan, sate lantuan, jukut gonda*, dlsb. Jangan demi dan untuk Ajeg Bali, gen kebudayaannya dipaksa berubah. Artinya, jangan apa-apa, atau sedikit-sedikit karena Ajeg Bali. Tapi dampak yang paling serius dari wacana ini adalah ketika menyusup ke alam pikir yang tak mudah hilang. Ini soal ingatan kolektif, yang jika disosialisasikan terus menerus akan mengeras dalam jiwa, lalu gampang sensitif dan tersulut.



Syak wasangka dibalik simbol Hindu

Dulu, Iwan Fals, penyanyi balada terkenal Indonesia tersandung masalah. Gara-gara menggunakan gambar burung garuda di sampul kasetnya, ia dianggap menista umat Hindu. Novelis terkenal, Dewi Lestari juga mengalami masalah serupa. Perkaranya, ia dianggap melecehkan umat Hindu dengan menempatkan Omkara di sampul novelnya. Burung Garuda dan Omkara adalah simbol suci dalam agama Hindu. Keduanya harus dihormati, disucikan. Tak ada pembenaran selain menganggapnya suci. Titik!

Iwan Fals seorang Islam, dan Dewi Lestari, Kristen yang kemudian menganut Buddha. Keduanya kena protes, mungkin karena mereka “orang lain” yang berani menggunakan simbol suci dalam Hindu. Dikhawatirkan, jika digunakan “orang lain” simbol-simbol sakral itu akan ternoda. Tak terbayangkan oleh para pemrotes itu jika kaset dan novel itu akan dibeli oleh orang non Hindu. Bisa saja barang-barang itu diletakkan ditempat yang tak sepatutnya, atau jika sudah bosan ditaruh ditempat yang tak semestinya. Jika rusak malah dibuang di bak sampah yang kotor. Nista. Kira-kira begitu pikiran para pendemo kedua seleb ini.

Namun reaksi keras malah tak diberikan kepada orang Hindu sendiri jika menggunakan simbol-simbol suci itu. Burung Garuda dan Omkara, dan masih banyak lagi simbol lainnya biasa

disablon pada baju atau kaos, apalagi jika ada sebuah *karya agung* yang membutuhkan pakaian seragam. Bahkan ada pula orang Hindu yang menggunakan tattoo Burung Garuda Wisnu dan Omkara di tubuhnya. Tak terbayangkan pula jika kaos itu dicuci di tempat jorok atau bercampur baur dengan celana dalam, atau orang Hindu yang bertatto Omkara melakukan tindakan asusila. Bukankah orang Hindu sendiri akhirnya menodai simbol sucinya, dan ini dosanya harus berlipat-lipat. Lebih nista, bukan?



Warung “100% Haram”, taktik atau siasat?

Jika jalan-jalan di seputaran Denpasar, bahkan mungkin di desa-desa, sering terbaca papan nama warung dengan menyebut makanan yang dijualnya haram. Misalnya, warung nasi babi guling “100% haram”, bakso babi “100% haram”. Hal yang sama pada warung soto babi atau sate babi. Fenomena ini bukan tentang keberanian semata, tetapi juga keterbukaan informasi. Mungkin terkesan ekstrim karena seolah melawan wacana *mainstream* halal. Sayangnya memang tidak ada “sertifikat haram” untuk melegitimasi wacana ini.

Ampas reformasi di awal 2000an telah melapangkan jalan kebebasan, keterbukaan dan kesetaraan, ditambah gerakan Ajeg Bali, serta menghangatnya gejala politik identitas, menjadi penyumbang besar fenomena itu di Bali. Melalui jargon “100% haram”, orang Bali ingin meneguhkan kembali identitas ke Baliannya. Asal tak kebablasan, misalnya dengan jargon itu, orang Bali lalu dengan *saklek* berdasarkan primordialismenya lalu membuat jarak “aku” dan “kamu”, “kami” dan “kalian” yang mengarah diskriminasi SARA. Misalnya, Bali hanya boleh dikuasai pedagang beragama Hindu, karena seperti kabar yang beredar, ada satu kelompok gerakan di Bali yang seolah “mengharamkan” beli makanan di warung yang penjualnya bukan umat Hindu. Duh!

Mungkin saja warung “100% haram” adalah strategi kontra *mainstream* dalam perebutan sumber daya. Mereka menjadikan warung sebagai alat bernegosiasi untuk meraih pelanggan dengan segmen yang eksklusif, bahkan bila perlu pembelinya adalah turis asing, sehingga nilai jualnya juga tinggi dan mahal. Dengan strategi itu mereka juga harus kerjasama dengan travel dan agen perjalanan. Warung “100% haram” bisa juga menjadi cara jitu *meledak* wacana *mainstream* karena yang unik itu selalu menarik perhatian. Jika yang membaca tersenyum, mereka sebetulnya sudah berhasil memengaruhi alam pikir pembacanya. Atau jargon ini juga bagus untuk mengatakan bahwa makanan di warung ini haram sehingga mereka yang punya keyakinan berbeda tidak harus memasukinya. Ada keterbukaan informasi sehingga tidak menjebak ketika masuk warung dan suasana menjadi tak enak antara pembeli dan pedagang. Berdasarkan pengalaman, mereka yang berkeyakinan dengan makanan halal ketika ingin berkunjung atau mengadakan kegiatan di Bali, soal kuliner menjadi pertimbangan khusus. Sebab menawarkan makanan tanpa unsur babi sekalipun berupa *lawar*, *jukut ares*, *tum*, serombotan dlsb tetap akan menjadi masalah. Ini soal selera dan kebiasaan di lidah yang tak bisa dijelaskan dengan kata.



Orang Bali masih transmigrasi, salah siapa?

Sebuah koran lokal di medio 2018 mewartakan ada puluhan kepala keluarga di Bali ditransmigrasikan ke pulau Sulawesi. Sontak kabar itu bikin resah. Ada yang tak percaya, *kok* orang Bali yang hidupnya sudah nyaman mau transmigrasi. Yang lain mulai berprasangka buruk dengan bilang *kok* orang Bali mau saja “dikeluarin” sedangkan pendatang dibiarkan masuk Bali dengan bebas. Bahkan pemilik tanah, villa, dagang, usaha dlsb katanya banyak dimiliki orang luar Bali dan orang asing. Akibatnya banyak yang berasumsi suatu saat orang Bali akan menjadi penonton saja di tanah dewata.

Transmigrasi adalah program nasional. Di samping untuk menggarap tanah-tanah produktif yang penduduk di wilayah itu masih terbatas, juga untuk membuat pemerataan pembangunan. Harus diakui, sisi politis program ini agar tidak terjadi disparitas antardaerah, begitu juga soal persebaran penduduk agar tidak sporadis dan jomplang di satu daerah. *Nah*, penduduk Bali sudah lama juga mengikuti program ini, terlebih di masa lalu saat ada bencana seperti letusan Gunung Agung atau gempa dahsyat di

.....

Buleleng. Tak salah, banyak penduduk terutama dari Karangasem dan Buleleng mendiami beberapa daerah di Indonesia, dan mereka ada yang berhasil, ada juga yang gagal karena medan yang harus “ditaklukkan” juga berat. Belum lagi bersaing dengan warga lokal di daerah transmigrasi.

Keriuhan menanggapi kabar orang Bali yang transmigrasi bermula karena mereka itu tinggal di daerah yang dekat dengan gemerincing dolar pariwisata. Masalahnya adalah tanah-tanah mereka sudah lama terjual habis, menjadi petani sudah bukan profesi menjanjikan, dan gengsi bagi anak-anak muda di pedesaan. Mereka tidak siap dan tidak membekali diri sejak awal dengan ketrampilan untuk bekerja disektor jasa dan pariwisata. Perubahan drastis seolah datang tiba-tiba, dan tak ada pilihan lebih sulit lagi selain meninggalkan daerah leluhurnya. Jadi, bukan kesalahan mereka semata, apalagi kita yang hanya menonton dan tidak sanggup menyelamatkan masa depan mereka. Bagaimana dengan peran pemerintah daerah selama ini? Mari juga tanyakan itu.



Ormas di Bali, kok makin berotot?

Siang menjelang sore itu saya terjebak macet di seputaran jalan Teuku Umar-Imam Bonjol-Sunset Road. Banyak orang di jalanan berteriak-teriak. Yang lainnya sambil berlari-lari kecil. Ada yang menonton, ada pula yang menghindari kerumunan itu. Esoknya dalam berita ternyata kejadian kemarin itu konflik antar ormas. Memang, sejak reformasi, ormas di Bali juga tumbuh subur, melanjutkan ormas-ormas sejenis yang sejak 1980an juga telah terkenal. Lalu momentum politik 1998 yang ditandai moncernya nama *pecalang*, kran lahirnya ormas di Bali deras meluber.

Meski saya tak pernah tahu visi dan misinya, ormas di Bali makin menguat baik secara politik, dan terutama secara ekonomi. Beberapa di antaranya malah seperti berhadap-hadapan dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Riak-riak konflik tak terhindarkan. Belum lagi ketika ormas-ormas ini harus bersaing dengan pendatang yang entah bagaimana kisahnya juga bisa sama-sama eksis. Kabar tak sedap, ormas-ormas ini juga ada *bekingnya*. Entahlah. Mungkin saja ada ormas Bali yang bertujuan memberdayakan dan melestarikan nilai dan budaya, tapi itu pasti jumlahnya minor. Persepsi publik sudah kadung terbentuk bahwa ormas-ormas itu cenderung tidak lunak.

Kini, ormas makin keras, tidak saja kepada orang Bali sendiri, tetapi juga orang luar. Meski faktor penguasaan sumber daya lebih dominan, tetapi gerakan ormas juga menasar ke soal etnis, suku dan agama. “Umpan matang” dengan dalih sebagai orang Bali yang tak boleh terasing di rumahnya sendiri ini juga akhirnya digoreng sekelompok orang, misalnya ada oknum yang ingin populer lalu mengkapitalisasi isu itu sehingga terkesan eksklusif. Karena itu tak heran, misalnya di media sosial muncul postingan bernada hegemonik dan ingin mendominasi. Dan penyukanya bisa ribuan karena emosi primordialnya dikulik. Orang luar tak boleh “berkuasa”, tapi sayangnya orang dalam tak ditingkatkan kualitasnya. Kalau sudah begini, politik identitas seolah sah dibangun dengan cara kekerasan budaya, kekerasan simbolik, hingga kekerasan fisik.



KB ala Bali, kebanggaan atau penyesatan?

Tak ada hujan, tak ada halilintar, tiba-tiba muncul wacana umat Hindu, khususnya di Bali kalau bisa ber-KB dengan empat anak atau lebih. Isu ini langsung viral, terlebih yang mengucapkannya adalah petinggi daerah ini. Ada yang mendukung, tak sedikit yang menolak. Soal isu KB ini tensinya naik turun, tergantung konteksnya, bahkan sudah menjadi isu lawas. Timbul tenggelam menunggu momentum saja. Misalnya, saat membicarakan jumlah umat Hindu di Indonesia, KB dengan *tagline*: “dua anak cukup, laki dan perempuan sama saja”, langsung menjadi tertuduh salah. Bahkan obrolan di pinggir trotoar sering nyaring terdengar: “umat Hindu *sih* mau saja dikibuli dan *belog ajum* ketika dipuji berhasil menjalankan program nasional, sedangkan umat lain berlomba-lomba punya anak banyak. Makanya umat Hindu terus berkurang”.

Saat saya mencoba membuat pertanyaan kecil dengan memanfaatkan googleform pada tanggal 1-10 Desember 2018, dari 92 responden yang mengisi, 78 orang menyatakan setuju atau 84,78%, 13 orang tidak setuju (14,13%) dan hanya 1 orang tidak menjawab (1,09%). Sebagai data mentah yang bisa diteruskan menjadi kajian lanjutan, jawaban spontan itu boleh

.....

jadi gambaran dari pikiran umat Hindu di Bali. Masalahnya memang, isu KB ala Bali itu kembali menguat saat, pertama, diucapkan oleh seorang gubernur dan biasanya karena hirarki struktur akan diikuti jajarannya. Kedua, politik identitas yang masih *up to date* untuk dimainkan. Dua alasan ini berkelindan untuk menggiring opini publik dan dikapitalisasi dengan memanfaatkan emosi keagamaan. Dan sejak Pilpres 2014, lalu mencapai puncaknya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, emosi keagamaan menghasilkan gerakan politik identitas yang sarat pragmatisme.

Di Bali, emosi keagamaan dalam rangka menyokong politik identitas itu dirasionalisasikan dengan mengulik sisi primordialisme umat sehingga lahir kebanggaan semu. Misalnya, dengan punya anak banyak, maka nama Nyoman dan Ketut tidak akan punah. Atau umat Hindu jangan sampai berkurang dan terus menjadi minoritas. Tiba-tiba banyak orang merasa harus membela wacana ini, meski dalam hati kelas menengah ke bawah juga bingung jika punya banyak anak siapa yang menanggung masa depannya dan bagaimana kualitas hidupnya kelak. Isu KB itu menjadi utopia di tengah banyak keluarga Hindu tidak punya anak, atau hanya punya anak tunggal. Selain faktor gaya hidup, juga kebutuhan yang kompleks, terlebih bagi generasi milenial yang bahkan menjomblo di usia matang. Bagi mereka, memiliki hubungan sosial yang intim jauh lebih penting tinimbang lembaga perkawinan. Dan bukankan beragama tidak seperti berpartai, yang harus punya sebanyak-banyaknya konstituen?



2

Komodifikasi,
Kolektivitas,
Pertunjukan

Pancoran suci: wisata rohani atau bisnis baru?

Saat ini, sudah tak perlu sembunyi-sembunyi untuk pergi ke tempat suci, salah satunya ke pancoran. Iklan di media sudah banyak mengabarkan. Papan nama di kiri kanan jalan juga sudah ramai. Beberapa di antaranya sudah dilabel sebagai wisata budaya, wisata rohani, wisata religi. Destinasi ini untuk mengakomodir kebutuhan sebagian orang Bali yang menyukai tren *melukat* atau sekadar mandi. Tak salah “pancoran suci” akan terus bertambah, terutama di daerah-daerah yang belum terjamah banyak pengunjung. Atau mungkin sengaja “disembunyikan” dulu sebelum menjadi ramai. Mungkin.

Namun pancoran atau pancuran yang awalnya sebagai *beji*, *campuhan*, tempat *nunas tirtha*, kini sudah banyak bertransformasi. Agar menarik, pancoran seperti itu perlu dilegitimasi dengan mitos-mitos tertentu, cerita mistik dan gaib, atau cerita karangan seorang tokoh di negeri ini pernah mandi lalu mendapat pawisik. Benar saja, sebulan kemudian ia sukses menjadi pejabat penting. Lama-lama pancoran itu juga jadi sakral. Bila perlu, lubang-lubang air di pancoran itu sengaja dibuat sesuai *ketekan* Bali, jadilah *pancoran telu*, *panca*, *pitu*, *sanga*, *solas*. Akibat komodifikasi seperti ini, pancoran jadi bisnis baru. Semua

.....

jadi berbiaya. Dari pintu masuk, penyewaan *selendang* dan *kamen*, parkir, wc hingga tak boleh membawa makanan dan minuman karena di dalam area pancoran sudah tersedia warung dan restoran.

Lepas dari soal di atas, sebuah pancoran haruslah memberikan nilai bagi masyarakat sekitarnya dan umat yang mengunjunginya. Sifat air yang mengalir adalah simbol Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan pengayom. Karena itu masyarakat jangan sampai merusak lingkungan, mengotori alamnya, tetapi sebaliknya, menjaga kebersihan airnya. Tujuannya agar menjadi tempat untuk menemukan keheningan batin dan jiwa karena ia pancoran suci. Pancoran sejatinya membuat hening karena airnya bening. Karena itu, bagi masyarakat tradisional, mereka baru merasa benar-benar mandi jika seluruh tubuhnya dicocor air. Tak aneh, dulu di kamar mandi dibuat pancoran. Kini, air dari *shower* sudah tak cukup menggantikannya.



Komodifikasi banten: kebutuhan atau keinginan?

Kini, komodifikasi sudah terlalu dalam merasuki ceruk-ceruk kebudayaan. Pintu agama pun tak kuasa menolak rembesan “bisnis” yang merambah *upakara yadnya*. Lahan basah ini lalu dimanfaatkan sepenuh-penuhnya pelaku pasar. Seniman tentu ikut terlibat. Tak apa. Dengan ini, umat dapat terlibat menikmati manisnya perputaran ekonomi. Semua mendapat kesempatan dari tetesan rejeki hukum pasar: *supply and demand*. Kok bisa?

Penjual *upakara* membeli bahan dasar dengan harga mahal, apalagi material itu didatangkan dari luar Bali. Karena permintaan dan kebutuhan yang makin tinggi, bunga, daun dan buah sudah tidak bisa diproduksi masyarakat Bali sendiri. Daya dukung pun mulai melemah, apalagi sawah dan kebun sudah banyak berubah fungsi. Membuat *upakara* juga butuh tenaga dan waktu. Tidak seperti dulu bisa dibuat keroyokan, dengan *ngayah*. Kondisi ini menyebabkan *high cost* yang harus dimaklumi. Terlebih saat ini sudah tak banyak perempuan Bali yang bisa membuat *upakara*.

Selain karena memang tidak bisa, mereka kebanyakan perempuan karir yang waktunya sudah habis untuk pekerjaan di

.....

kantor. Tak ada waktu untuk belajar, atau memang sudah tidak ada pembelajaran di dalam keluarga. Sabtu dan Minggu juga digunakan untuk menyalurkan *hobby* lain atau sekadar jalan-jalan. Belum lagi, suami yang beristrikan perempuan yang sebelumnya non Hindu. Jadi, membeli dengan harga mahal sekalipun, kini sudah tak jadi soal. Pembeli tak merasa kecewa, penjual tersenyum. Sama-sama menguntungkan. Jika kini *upakara* mulai mahal, harus dilihat dengan cara yang tak sederhana. *Complicated*.



Menyederhanakan, bukan menghilangkan, gitu aja kok repot?

Gebogan “mini market” berbiaya tidak murah. Tentu. Bahkan bisa sangat mahal. Jika beberapa di antaranya dibeli di supermarket, bisa lebih mahal tinimbang dengan tawar menawar di pinggir jalan atau di pasar tradisional. Sedikit ngotot tak apa. Itu watak orang berbelanja, apalagi semua kebutuhan hidup naik turun tergantung ekonomi makro, juga politik. Belum lagi menjelang hari raya besar keagamaan tertentu. Juga menjelang akhir tahun, padahal saat yang sama “Sale” dengan diskon gede-gede terpampang di mal. Bahan *upakara* juga bernasib sama.

Upakara menjadi mahal bukan saja tergantung musimnya, tetapi juga sirkulasi barang. Hampir semua bahan *upakara* di datangkan dari luar Bali. Biaya perjalanan hingga *ngangkut* ke pasar-pasar, semua berbiaya. Tak ada yang gratis. Mahal dari hulu ke hilir, dari pemasok hingga ke penjual di jalan trotoar. Kebutuhan makin tinggi dan banyak, penyedia tak seimbang. Harga diserahkan di pasar. Di Bali sendiri, sudah tak banyak tersedia bahan baku. Lahan menanam buah dan bunga sudah jauh berkurang. Di pekarangan rumah, tak juga ada tanaman bunga, tapi sudah di paping atau “batu sikat”. Tidak seperti dulu.

.....

Di pinggiran *sanggah kemulan*, masih ada *mitir* atau *pacah* tumbuh dan dipetik saat sembahyang. Lumayan untut berhemat.

Hari raya besar dan kecil di Bali tiap hari dilaksanakan. Semuanya membutuhkan sarana. Saat harga melambung dan daya dukung lokal tak cukup, semua menjerit. Namun untuk dan atas nama *yadnya*, hati dipaksa tenang. Tapi gengsi tak dapat ditukar dengan kesederhanaan. Belum lagi tetangga sebelah kiri kanan berani *jor-joran*, padahal semua tahu, mereka bisa saja juga punya banyak hutang dan kreditan. Akhirnya, *banten* tetap berbahan impor yang mahal, padahal mungkin, kualitas bahan lokal tak jauh beda. *Apel malang, biyu susu, juwuk bali, jaja uli* masih bisa menggantikan buah impor, kue donut dan pizza. Ini bukan tentang menghilangkan, mengurangi apalagi menghapus sarana *upakara* yang dihaturkan itu, tetapi hanya menyederhanakannya. Bukankah manusia menghaturkan hatinya yang tulus dan mewakilkannya pada *banten*? Tapi, lagi-lagi, ini soal gengsi dan budaya pop. “*Uang-uang saya, kalau saya bisa meyadnya mewah dan besar, kenapa situ yang sibuk urusin*”, kata tetangga saya yang sering *sigug* jika sudah bicara gengsi.



Kemegahan mekudus dengan “Kori Kardus”

Jika ada upacara perkawinan, yang tampak megah di jalan adalah “kori kardus” berukir, *meprada* dan warna-warni kain yang senada. *Kori* itu bisa dibongkar pasang. Sewanya juga harian. Jika di kota, seperti Denpasar dan Badung bisa dikisaran 500 ribu hingga jutaan. Menjadi makin mahal tergantung ukuran dan tingkat kerumitan ukirannya. Tergantung selera dan gengsi penyewanya karena tersedia berbagai pilihan, termasuk ornamen yang menunjukkan kelas sosial tertentu. Jika tak rusak, *kori* itu bisa di-*recycle*, disewakan kembali.

Jika “musim kawin” tiba, “macet musiman” juga datang. “Kori kardus” itu kadang mengambil ruang lebih lebar baik ke samping maupun terutama ke depan halaman rumah. Belum lagi tenda *knock down* yang dipasang di badan jalan, lengkap dengan kursi-kurisnya. Bahkan satu jalanan bisa digunakan, sehingga sering ada pengalihan jalan. Semuanya sewa, tak ada yang gratis. Akibatnya, semua *property* ini adalah bisnis besar yang menggiurkan di Bali. Harga sebuah perkawinan tersedot lebih banyak ke sektor jasa ini, sedangkan harga *bantennya* mungkin hanya 30% saja dari *catering*, *kori*, *prewedding*, tenda, kursi, pakaian, tukang hias, MC, dll. Semuanya bisa disediakan oleh satu *event organizer* (EO) atau kongsi berbagai usaha sejenis, seperti halnya EO sebuah festival.

.....

“Kori kardus” itu biasanya ditempelkan pada *kori* atau pintu masuk rumah yang bersangkutan. Jika masuk gang, di mulut gang kori itu dipasang. Secara *artificial*, upacara akan tampak meriah, meski yang bersangkutan menurut tetangga dan orang-orang di daerah itu, mungkin biasa-biasa saja. Tapi keinginan merayakan peristiwa sakral sekali seumur hidup tentu harus dimaklumi. Begitu juga membuat peristiwa ini menjadi megah, saat ini bukan hal yang sulit-sulit amat. Asal bisa sewa, semua beres. Harga akan menjadi relatif. Yang salah mungkin jika terlalu *nuutin indriya*. Apalagi *meseselan* setelah upacara, itu sudah tak berguna. Akhirnya, *yadnya* yang seharusnya suci, ternodai oleh adu gengsi dengan tetangga atau tak memahami *tattwa* sebuah *yadnya*.



“*Penjor Lebay*” *untuk ego yang alay*

Saat Galungan, kecuali mungkin di beberapa daerah di Bali Utara, jalanan akan semarak karena disetiap pintu atau *kori* terpasang *penjor*. Pemandangan yang indah tentu saja. Semua bahan *upakara* berasal dari alam. Bambu, daun, pala gantung, pala wija, janur dan ambu, dll dirangkai menjadi satu, menjadi karya seni yang artistik. Begitulah perayaan hari suci di Bali. Ajaran agama terejawantahkan secara nyata melalui struktur budaya, seni lalu dikuatkan, dan dilegitimasi oleh adat istiadat. Bentuknya bisa sangat berbeda-beda. Jangankan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, satu desa dengan *desa pakraman* bisa saja ada perbedaan. Itu karena *loka dresta* dan *desa mawacara* membuatnya lentur. Terpenting esensinya sama.

Saat bahan yang dibutuhkan berlimpah, dan waktu luang tersedia, orang bisa membuatnya dengan mudah. Bahan-bahannya pun alamiah, tak ada imitasi. Bahkan beberapa bahan, salah satunya *plawa* bisa diambil dari pohon yang ditanam di pekarangan. Kini bentuk *penjor* dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan, terutama bentuknya. Bahan-bahannya juga terbuat dari daun lontar yang tahan lama dan *disteples*. Semuanya tinggal dipasang, tak ada yang dibuat lagi. Jika mau, pembeli menambah ongkos untuk sekalian diantar dan dipasang.

.....

Kini membeli *penjor* sudah tak sulit. Ukuran bambunya makin besar dan panjang, lengkungannya pun makin menukik. Tambah megah karena dilapisi kain. Jika mau lebih mahal lagi, bisa menggunakan kain beludru. Warnanya bisa dipilih, biasanya merah, putih atau hitam, warna yang melambangkan kebesaran. Mungkin juga simbol status sosial. *Sampian* dan hiasan yang menggantung di *penjor* juga sama mewahnya. *Sanggah cucuk* di depan *penjor* juga tak lagi sederhana, tapi besar, megah, dan mewah. *Penjor* yang *wah* ini oleh seorang pemerhati budaya diistilahkan “*penjor lebay*” yang merujuk *penjor* ini terlalu berlebihan karena sudah sangat jauh berbeda dari *penjor* biasa. Bukan saja berlebihan dalam pernak perniknya, tetapi juga ukuran dan harganya. Bagi yang berego alay, kemegahan seperti ini tak masalah, sayangnya kesalahan sosial kita sering tak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Jika tetangga kiri kanan terkena musibah, kita bisa abai, tetapi untuk *yadnya* bermewah-mewahan, kita pongah menjual warisan leluhur.



Mendulang gengsi di atas dulang

Ibu setengah baya itu menangis tersedu-sedu. Saat ditenangkan, ia malah meronta sejadi-jadinya. Ia pun menjadi pusat perhatian karena saat itu sedang banyak orang menuju pura. Maklum ada odalan *nadi*. Usut punya usut, ibu itu tidak menyesali hilangnya kesempatan untuk *beryardnya*, tapi menangisi *dulangnya* yang jatuh. Sebenarnya tak rusak parah karena hanya sedikit pinggiran *dulang* itu *gepeh*. Perkaranya, *dulang* itu *meprada* dan berharga mahal. Dengan terisak ia mengaku belum melunasi cicilan *dulang* itu dari tetangganya. *Mimih dewa ratu*.

Ibu itu, dan mungkin masih banyak lagi ibu lainnya akan merasakan hal yang sama. Orang kini lebih merasa rugi jika properti ke puranya rusak, apalagi hilang. Tak salah karena kini properti seperti *dulang* sudah menjadi barang mahal. *Dulang*, *keben* yang kini juga *meprada* mahal, *kebaya*, *kamen*, *sanggul*, dan perhiasan lain yang menempel di kuping, leher dan jemari, bagi sebagian hedonis adalah simbol keberhasilan, tanda sebuah kesuksesan. Ia harus diperlihatkan di ruang publik, seperti sosialita dengan beragam tas, jam tangan, dan pakaian *branded* lainnya.

Tak salah memang. Pergi ke pura harus dinikmati sebagai perjalanan yang menyenangkan. Diharapkan hati akan menjadi tenang dan mendamaikan. Itu salah satu tujuan bersembahyang,



bukan sebaliknya membuat jiwa menjadi kering karena *minder* dan dipenuhi *jengah* berkompetisi. Membawa properti yang saat ini tak ada yang murah, sekali lagi tak salah. Yang keliru adalah niatnya hanya pamer dan mempertontonkannya dengan perasaan penuh kompetisi. Bentuk upacara boleh semakin megah, apalagi dilakukan dengan keikhlasan, tetapi mengisi jiwa dan batin dengan kebaikan dan kemuliaan juga sangat penting.



Gebogan atau “mini market” berjalan?

Saat *odalan*, terutama yang *nadi*, atau pada upacara keagamaan yang berskala besar, orang Bali akan membuat *gebogan*. Ada yang disusun bertingkat-tingkat, ada juga dengan menggunakan *keben* saja. Keduanya sama. Bahkan jika dihitung kembali, baik jumlah kue, buah, dan harganya boleh jadi tak jauh berbeda. Secara esensial, juga sama dalam agama. Tak harus dibeda-bedakan. Hanya wadah dan bentuknya saja yang berbeda. Soal perbedaan ini bisa saja karena selera semata, atau mungkin juga karena gengsi?

Begini. Seorang ibu di belakang saya berbisik pelan, namun gumaman sinisnya jelas terdengar. Perkaranya sederhana. Ia iba melihat istri saya membawa *keben*, bukan karena kami tak sanggup membuat *banten* atau *gebogan* bertingkat dengan *dulang*. Istri saya memang belum bisa menjinjingnya. Tinimbang jatuh, tentu merepotkan. Jadi *banten* dengan *keben* menjadi pilihan masuk akal. Memang *kebennya* juga tidak *meprada*, sehingga aneh dilihat di antara *dulang-dulang meprada* yang menjulang. Belum lagi isi *banten* *keben* istri, tak semeriah *gebogan* bertingkat itu yang dihiasi aneka “barang-barang” yang ada di mini market.

.....

Memang perubahan waktu tak bisa ditolak. Kini sedang tren *gebogan* menggunakan beragam merk minuman soda, larutan penyegar, dan sejenisnya. Tak salah karena dewa dalam pandangan orang Bali juga berkarakter manusia (*personal God*). Suka minum, laiknya manusia. Kuenya juga beragam. Tak ada lagi *jaja uli, satuh, iwel* tapi sudah diganti donut dan pizza. Hebatnya, masih terbungkus plastik, mungkin takut saat *dilungsur* kena polusi dan debu, tidak seperti di masa lalu udara yang relatif masih bersih. Jangan harap juga ada *biyu kayu, juwuk Bali*, karena hampir semua buah diimpor. *Gebogan* “mini market” yang indah dan mahal ini sudah menjadi lambang gengsi bagi penjinjingnya. Namun sayang, *sesari canang* di atas *gebogan* mahal itu hanya diisi 1000-2000 perak saja.



Upakara online: tak semudah memesannya

Dulu, ibu-ibu dan anaknya, biasanya yang perempuan, sibuk mempersiapkan *banten* bersama-sama. Bapak dan anak laki-laknya juga ikut. Kini tak banyak orang punya waktu mempersiapkan *banten*. Dunia kerja, entah yang bergerak di sektor jasa, industri hingga PNS sama sibuknya. Belum lagi ke tempat kerja juga semakin macet. Pergi subuh, pulang larut. Habis waktu di jalanan. Sabtu-Minggu juga kadang membawa pekerjaan kantor ke rumah. Tentu tak seperti dulu. Tapi waktu terus akan berubah.

Tak banyak waktu untuk berkumpul, apalagi bersama dalam waktu yang lama. Jika pun bisa bertemu, orang-orang sudah sibuk dengan diri sendiri, terutama karena kehadiran benda ajaib yang makin canggih: *android*. Mau bikin *banten*, sudah banyak diganggu *chat* WhatsApp, membalas komentar Instagram, memberi *like* Facebook, atau sekadar berkicau di Twitter. Belum lagi kalau punya aplikasi yang lain. Karena lebih sibuk *online*, *banten* pun kini bisa dipesan via aplikasi. Jadilah sibuk “membeli” *banten* di *online*, tinimbang membuatnya bersama suami, istri, apalagi dengan anak-anak milenial yang juga masing-masing pegang *gadget*.

.....

Seorang ahli manajemen, Rheinald Kasali bilang, fenomena di atas disebutnya *shifting*, sesuatu yang tak dapat dihindari apalagi ditolak. Dunia nyata telah berpindah ke dunia *online*. Apa yang ada atau bahkan tak ditemukan di dunia nyata, sudah tersedia di *online*. Dunia sudah mengalami begitu banyak perubahan. Ahli ini juga menyebutnya sebagai *disruption*. Masalah muncul manakala kesucian *upakara* yang dijual disitus *online* mulai diperkarakan. Apa jaminan bahan *upakaranya* bersih secara *niskala*, apakah yang membuatnya, apalagi non Hindu, paham makna *upakara*, dan pertanyaan klasik lainnya. Wajar, tentu saja. Kekhawatiran yang sama juga sempat menjangkiti saat kemunculan beragam aplikasi *online* yang menawarkan kemudahan hidup, entah transportasi maupun makanan. Kini kita malah sangat menikmati layanan itu. Ketika pukul 23.00 lapar, tinggal minta diantarkan *nasi jinggo* ke rumah. Suatu saat, wanita-wanita karir yang tidak punya waktu dan tak bisa membuat *banten* akan menikmati untuk membeli *banten* secara *online*. Mungkin, dan siapa yang tahu.



Swalayan upakara, bukan masalah murahnya

Baru-baru ini, di laman berbagai medsos beredar promo *yadnya* murah. Seperti biasa, ada pro dan kontra. Tawarannya cukup menggiurkan. Biaya *upakara ngaben cuma* tiga juta. Upakara lain yang tidak sebesar *ngaben* selama ini, biayanya lebih murah lagi. Pokoknya membalik *mindset* banyak orang. Semua *banten* murah ini bisa dipesan secara *online* lengkap dengan nomor teleponnya. Jika pemesannya masih di Bali bisa diantar ke lokasi, tinggal ditambah ongkos kirimnya.

Apa yang ditawarkan dalam promo itu tentu sesuatu yang unik, seperti tak mungkin. Yang menarik adalah *caption* setiap promosinya yang intinya jangan sampai membuat umat Hindu sulit, menjadi miskin, apalagi sampai membeli *banten* dengan berhutang. Soal umat Hindu di Bali boros, sudah lama diteliti. Pada 2010 disinyalir tiap tahun umat Hindu di Bali menghabiskan uang 1,3 triliun. Belum lagi sampah *upakara* dan pelaksanaannya yang dikesankan ribet. *Upakara* swalayan menawarkan cara baru untuk membuat umat Hindu melaksanakan *yadnya* dengan murah dan mudah. Kira-kira begitu.

Tapi promosi itu sepertinya ditanggapi biasa-biasa saja. Seperti situs *upakara online*, *upakara* swalayan juga tidak

.....

lantas *booming*. Apa yang kurang? Murah dan mudah, kata kunci membuat orang seharusnya antusias. Begitulah orang Bali. Ada sisi lain dalam karakteristiknya yang tak mudah “ditaklukkan”. Bagi mereka, *meyadnya* itu *rame-rame* dan megah. Tak peduli akan *nyicil* hutang berapa, atau tak risau lagi tanah warisan keluarga dijual. Apalagi kini, dan biasanya pada musim kampanye politik, mengundang hadir seorang tokoh berpengaruh atau pejabat publik adalah sebuah keistimewaan. Bahkan seorang bupati bisa hadir di *upacara telubulanan* seorang warga. Di mata masyarakat, jika sanggup mengundang tamu, dia akan dibilang “mampuh”, dan berharap status sosialnya terangkat. Jika kemudian *yadnya* yang mereka laksanakan terasa memberatkan, paling hanya *megrenggengan* dan *mekrimikan* saja. Semudah itu untuk membuat hatinya kembali nyaman.



Seikhlas Ekalawya, bisa?

Dulu, waktu jaman belum berubah, selepas *rerahinan*, *i pekak* akan menanam *bunga mitir* atau *pacah* di halaman *sangah*. Belum lagi *plawa* dan bunga-bunga lainnya sengaja ditanamnya dipinggir pagar atau tembok *penyenger*. Tak banyak memang, tapi lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari. *I bape* biasanya juga memelihara ayam. Karena halaman cukup luas, kadang juga memelihara bebek dan babi di *teba kauh*. Laku ini tentu sekarang tak cukup untuk rumah BTN yang bahkan tak sampai 1 are. Tapi ini soal niat dan kemauan, soal menjaga keberlangsungan alam. Mungkin pelihara bebek apalagi babi tak mungkin lagi, tapi bunga dan *plawa* rasanya bisa, sangat bisa.

I pekak dulu juga kalau menebang pohon, apalagi pohon besar, salah satu pucuk atau ranting pohon itu dipotongnya lalu “ditanam” di tengah kayu bekas pohon yang tertebang itu. Saya tahu ranting itu tak akan tumbuh. Tapi mungkin itu caranya menghormati pohon yang telah ditebangnya. Atau ia ingin mengajarkan jika kita potong satu pohon, tanam juga satu pohon penggantinya. Kearifan lokal yang entah kini rimbanya di mana lagi.

Laku orang-orang tua di masa lalu itu sungguh menyejukkan. Mereka menanam pohon bunga, dedaunan dan binatang peliharaan bukan untuk dijual. Tetapi dipersembahkan saat *rerahinan*, *odalan* atau upacara besar lainnya, yang paling



sering saat Galungan. Mereka menghidupi ritus dengan cara sederhana namun bermakna. Dengan laku ini pula, mereka mempersembahkan apa yang paling mereka sayangi dan cintai, bukan mengimitasi niat yang diwakili benda-benda (bahan *upakara*) yang bisa dibeli mahal. Sayangnya benda-benda itu akhirnya hanya pajangan untuk mewakili gengsi kita di mata sosial. Ekalawya dikenang abadi sebagai manusia paling *lascarya* saat mempersembahkan ibu jari kanannya, bagian paling istimewa seorang pemanah, sebagai *daksina* kepada Bhagawan Drona. Tapi karena ini bagian dari tipu muslihat Drona, ia tetap dianggap lebih hebat dari Arjuna. Jika ingin belajar ikhlas, belajarlah kepada Ekalawya. Bisa?



Apa gen dadi di Bali

Tren dalam budaya Bali, dan juga agama Hindu, silih berganti. Datang dan pergi sesukanya, seperti budaya pop. Ada yang bertahan lama, ada juga yang hanya sekejap. Baju ke pura, baik perempuan maupun laki-laki juga begitu. Kebaya menerawang sexy, berlengan pendek, lalu kain atau kamen ketat dengan menampakkan lekukan tubuh. Bahkan seorang pemangku istri sempat viral menggunakannya. Kini, kembali ke model *jadul*: kain putih kuning. Dibeberapa desa pakraman bahkan kini memasang baliho pakaian sembahyang, lengkap dengan simbol centang hijau sebagai pakaian sopan, dan silang merah tanda pakaian yang dilarang masuk pura.

Pakaian laki-laki juga idem. *Saput* sempit kuning, lalu beragam corak, sempit pula *poleng*. Bajunya pernah berwarna-warni, baju koko, kini kaos oblong saja cukup. Dulu bawa dompet kecil, kini bawa kompek. Isinya: *charger*, *dompet*, *hp*, *tablet*, *powerbank*, dlsb. Dulu *udengnya* kain lepas, kini *udeng* jadi, lengkap dengan nomor ukuran kepala, seperti teman muslim membeli kopiah.

Sampai kapan tren itu akan bertahan, waktu yang biasanya menguji. Tapi salah satu karakter budaya Bali adalah

.....

kemampuannya mengubah dari dalam (*internal conversion*). Semua anasir asing biasanya akan ditangkap dan direspon. Diuji dengan ragam percobaan dalam realitas. Jika kehidupan tidak menghendaki, anasir itu akan dibuang tak terpakai. Jika disepakati bersama, akan diteruskan untuk menunggu digantikan yang lain. Asal tidak merusak dan mengubah struktur kebudayaannya, anasir asing itu akan diterima. Misalnya, ada yang ingin supaya kurban binatang saat *caru* menggunakan gambar saja agar tak membunuh-bunuh (*himsakarma*). Ada juga ide nakal. Saat karya agung, *pemangku* makin sedikit, tetapi *pemedek* makin membludak. Saat *ngetisin tirta*, *pengayah* kewalahan. Kalau begitu, pakai selang air saja supaya *damuh* semua dapat *nunas tirta*. Dua ide ini, tentu saja gagal total diterima. Keduanya seolah mendekonstruksi dan melawan *consensus* bersama. Padahal beragama itu juga soal kesepakatan bersama.



Bade beroda: efisiensi atau ngekoh?

Di *catuspata* desa, *bade* itu diputar tiga kali. Tapi tak ada teriakan riuh rendah dari orang-orang yang menggotongnya. Sorakan itu kalah dengan suara *gamelan baleganjur* dan *angklung* yang masih setia mengiringi perjalanan *bade* ke *setra*. Tak seperti dulu. Para pemuda dan beberapa orang tua yang berbadan kuat seolah balapan ingin menggotong *bade*. Mereka bersuka cita. Sangat ramai. Itu sebabnya, perjalanan *bade* adalah sebuah parade, sebuah pertunjukan.

Kini, *bade* itu sudah memiliki roda dan *sanan bambu* dibuat hanya untuk menopangnya agar tak jatuh dari alas roda. *Bade* itu hanya didorong beberapa orang, tak lebih 10 orang. Bahkan tuas di depan *bade* bisa ditarik satu orang saja. Anak-anak muda dan para orang tua hanya mengikuti dari belakang. Bahkan beberapa warga desa dan *krama banjar* yang kebetulan berprofesi karyawan ada juga yang tidak ikut. Beberapa di antaranya malah langsung menuju *setra*. Setelah *pengabenan*, mereka pulang mendahului dan kembali ke kantor masing-masing.

Pekerjaan di dunia industri dan jasa telah membuat warga desa dan *krama banjar* tak bisa lagi *ketog semprong tedun* ke *setra*. Waktu bekerja yang menggunakan sistem *shif*, tak

.....

menentu, juga tak bisa lagi minta ijin begitu saja. Apalagi jika cuti sudah habis. Situasi ini mulai dapat dimaklumi, akhirnya. Mekanisme adat juga mulai berubah mengikuti gerak jaman. Kini banyak orang juga tak terbiasa memikul *bade* karena terbiasa disopirin atau justru *nyopirin*. Bahkan ada kasus *krama* tangannya keseleo atau patah tulang saat memikul *bade*. Orang-orang juga banyak yang tak mampu jalan jauh diterik matahari. Jalanan juga sudah mulai licin di *hotmix* hingga ke kampung-kampung sehingga tidak sulit lagi dilalui. *Bade beroda* juga sudah tidak memacetkan jalan. Mengatasi kompleksitas kehidupan itu, *bade* seperti ini menjadi jawabannya. Bahkan kini sudah mulai ada *bade* di atas mobil bak terbuka. Terpenting seluruh tahapan *ngaben* memenuhi syarat agama dan yadnya. Begitulah Hindu.



Karena dunia makin “mengkerut”

Siapa sangka 10 atau 20 tahun lalu dunia tak seperti sekarang. Dulu, dulu sekali, orang berkirim surat dengan burung merpati, lalu lewat pos, faximile, email, kini dengan aplikasi *android*. Mengirim satu berita yang sama, dalam waktu yang sama, ke banyak orang kini menjadi niscaya. Dunia telah berpindah ke layar *handphone* begitu cepat. Transformasi di hampir semua aspek dalam teknologi informasi komunikasi begitu canggih. Ya, teknologi menawarkan perubahan besar-besaran, memudahkan, memurahkan, dan mempercepat.

Dulu, berita penemuan benua Amerika oleh pelayar Christopher Columbus baru diketahui raja Spanyol enam bulan kemudian. Kini, semua peristiwa di belahan dunia mana saja, yang kejadiannya dalam waktu bersamaan sudah dapat diketahui. Media cetak yang dahulu beritanya ditunggu keesokan harinya, sudah banyak yang gulung tikar. Pun gerai-gerai ritel yang mengais untung saban akhir pekan, atau hari raya melalui diskonnya, sudah banyak merumahkan pegawainya. Semuanya telah digantikan oleh “pegawai” tak terlihat. Tinggal pencet-pencet aplikasi, barang sudah sampai di depan rumah.



Memang tak semua akhirnya berdampak baik, tapi ini soal bagaimana melakoni perubahan. Kini makin banyak orang lama di kamar mandi, karena sambil jongkok baca berita. Masakan ibu-ibu sering gosong karena keasyikan *streaming hot gossip* para artis. Janjian dengan teman sudah mulai tak menyenangkan karena setelah kumpul, masing-masing memegang *gadgetnya*. Sibuk sendiri-sendiri. Baru bangun pagi dan akan tidur malam, melihat *handphone* adalah ritual yang tak boleh diabaikan. Kadang mengalahkan ritual sembahyang. Dunia kini sudah benar-benar mengecil. Jangan-jangan nanti *ida pedanda nguncarang weda* melalui *teleconference* dengan umat Hindu yang ada di pedalaman atau perbatasan wilayah. Entahlah, tapi semoga itu belum terjadi.



Kesinoman digital, mungkinkah?

Dunia yang mengecil akibat kemutakhiran teknologi tak pandang bulu merembesi kantor modern hingga warung tradisional. Dari orang-orang tua ke anak-anak. Bayi pun kini sudah bermain-main dengan *handphone*. Jendela linimasa medsos tak pernah sepi. Komunikasi via aplikasi adalah nafas kehidupan. Jaringan pribadi hingga publik tersambung tiap saat, dengan orang yang dikenal bahkan yang sama sekali tak diketahui, hanya karena “berteman” di aplikasi medsos.

Group percakapan menjadi tren. Anak-anak SD juga memilikinya, belum lagi ibu-ibu orang tua murid. Group percakapan karena urusan kantor, teman karib, alumni, ikatan profesi, perkumpulan spiritual, aliansi etnis, hingga *banjar adat*, dusun dan tempekan bukan hal baru. Seorang teman bahkan punya lebih dari 25 group percakapan dalam satu aplikasi. Belum lagi aplikasi yang lain.

Kesinoman di beberapa daerah di Bali juga mulai terinspirasi. Mengingat pekerjaan yang makin kompleks, saat akan *ngarah*, mereka kadang menemukan rumah anggota *banjar* masih kosong karena suami istri pulang kantor hingga malam. Belum lagi kini anggota *banjar* tinggal tidak dalam satu komplek atau lingkungan



yang sama. *Ngarah* melalui pesan *online* sudah semakin diterima. Jika kini *e-meeting* semakin menjadi pilihan, jangan-jangan dan mungkin belum, akan ada *e-sangkep*. Jika *ngarah* sudah massif melalui *online*, jangan-jangan pula akan ada aplikasi bunyi *kulkul* menandakan *sangkep* atau acara adat akan dimulai. Semua demi dan atas nama efisiensi dan efektivitas. Sebuah konsekuensi modernitas, meski hari ini kita anggap sesuatu yang tak mungkin.



Ritus, untuk apa?

Para antropolog menempatkan agama sebagai inti kebudayaan, yang dengannya itu orang-orang dipandu berdasarkan ide, gagasan, dan nilai untuk hidup bersama. Representasi kolektif bersumber dari laku budaya, salah satunya ritual. Tak salah, tahapan sebuah upacara akan menghasilkan kesadaran kolektif. *Ngayah* menjadi sangat penting, meski itu akan membuat sebuah ritus menjadi mahal. Bagaimana tidak. Jika *ngayahnya* satu minggu, saat puncak upacara, biaya *bantennya* tak lebih dari harga sehari orang *ngaturang ayah*.

Ritual di Bali sering dituduh mahal dan boros. Seperti buang-buang uang saja. Kapan orang Bali bisa menabung, apalagi berinvestasi. Tapi begitulah di Bali. Tak perlu didebat, percuma saja, karena yang penting ramai, dan bisa *menyamabraya*. Bagi orang Bali, kenikmatan yang tak bisa dibayar lunas adalah kebersamaan saat merayakan upacara. Itu sebabnya, sebuah ritual seolah bisa “memaksa” orang untuk ke luar rumah agar terlibat dalam ritual.

Bahkan pergi ke pura saat *odalan* misalnya, boleh jadi bukan semata untuk sembahyang. Tetapi juga untuk sekadar ke luar dari rumah, karena banyak mata sosial akan mencatat rajin malasnya kita ke pura. Atau sekadar ketemu sanak saudara, atau mungkin janji dengan teman. Ke pura juga artinya

.....

memperhatikan siapa saja yang *payasannya* mentereng ke pura, menonton *ilen-ilen*, bahkan bukan saja untuk melihat permainan bola adil, tetapi ikut bermain di dalam arena. Karena jika untuk memuja Tuhan, dan memohon agar seluruh doa dikabulkan, bisa dilakukan di rumah saja. Tapi itu tak cukup. Sebagai orang yang struktur kebudayaannya bersifat komunal, orang Bali seolah dipanggil untuk selalu hidup dalam kolektivitas itu. Karena itu *tirthayatra* misalnya, selain untuk tujuan sembahyang juga berarti plesir, sehingga harus beramai-ramai.



Hidup kolektif atau karena tak bisa menyendiri?

Orang Bali tak bisa hidup individual dalam arti yang sebenarnya. Di manapun, kapan pun, mereka akan mencari kelompoknya. Entah berdasarkan desa asalnya maupun *soroh* atau klennya. Bahkan di luar Bali sekalipun, mereka akan selain membangun pura umum dengan *padmasana*, juga membuat *tempek*, *banjar* dan *pasraman*. Identitas desa asal maupun *soroh* terasa kental sekali. Di Pura Tirtha Bhwana Bekasi, tempat saya dulu sebagai *pengempon*, dan pura lainnya di Jakarta misalnya, umat Hindu diikat oleh sistem kekerabatan seperti itu.

Kesadaran kolektif melalui identitas desa atau daerah asal juga sangat kuat di wilayah transmigrasi di mana orang Bali tinggal. Tak salah tentu saja. Tetapi kadang juga kebablasan. Dalam melaksanakan *upacara yadnya*, seringkali fanatisme identitas seperti ini menjadi benih konflik. Misalnya, ada sekelompok orang yang ingin menggunakan adat daerahnya sendiri, lalu mendapat resisten oleh mereka yang berasal dari daerah Bali lainnya. Mungkin terkesan ironi karena fenomena



ini terjadi di Jakarta, tempat di mana persoalan identitas lokal tak perlu menjadi soal, tapi itulah faktanya.

Tak ada yang salah dari kebiasaan seperti itu. Gen kebudayaan Bali yang disokong kehidupan agraris memungkinkan hidup kolektif bisa dilakoni di mana saja, termasuk di luar Bali. Bahkan di Bali sendiri, kolektivitas itu dibangun di atas *sekaa*, baik yang permanen seperti *sekaa teruna*, *sekaa kidung*, *sekaa gamelan*, tetapi bisa melalui *sekaa* yang bersifat temporer, yang sekali dibuat lalu bubar. Ketika kebun para petani diganggu babi-babi hutan, mereka sepakat membuat *sekaa meboros*. Setelah babi-babi itu terusir, *sekaa meboros* hilang. Begitu juga saat pohon kelapa diganggu *semal*, mereka akan membuat *sekaa semal*. Jadi, sepanjang hidup kolektif itu mendatangkan manfaat, persaingan antarkelompok masih bisa ditoleransi.



Ruh wisata Bali, ya budaya dong!

Tak usah jauh ke luar negeri mencari pemandangan indah. Di Indonesia banyak. Dari Sabang, di Aceh ujung Barat, hingga Merauke (ujung Timur). Juga Talaud (ujung Utara) dan Rote (ujung Selatan). Daratan, gunung dan bukit banyak yang indah. Laut dan pantai banyak yang mempesona. Ini yang dinamakan zamrud katulistiwa. Koes Plus Band, bahkan secara hiperbolik bilang, “*tongkat saja di tanam bisa tumbuh*”. Elok di atas tanah dan di bawah laut, yang memanjakan mata, bukan hanya mata orang asing tapi juga domestik. Dan wisata Indonesia bukan hanya tentang Bali, sebenarnya.

Untuk mendukung pariwisata Indonesia makin mendunia dan massif, Kemenpar bahkan harus membuat “10 Bali Baru”. Apa maksudnya? Yang paling sederhana, program ini dapat dibaca agar pariwisata tidak berpusat di Bali; terdapat pemerataan kesempatan setiap daerah untuk “menjual” potensi wisatanya; dan keadilan bagi daerah yang ingin berkembang sehingga tidak ada disparitas yang terlalu jauh. Program ini tentu dan pasti sangat baik. Jika perlu semua daerah didorong untuk tampil di beranda depan.

.....

Sampai saat ini belum ada rilis apakah “10 Bali Baru” itu sukses besar. Jika melihat kesepuluh daerah itu, yang sebetulnya sudah familiar, salah satunya Borobudur, tampaknya akan sukses. Mungkin tidak dalam hitungan tahun tapi bisa puluhan tahun mendatang. Masalahnya, apakah Bali bisa di *coppaste* untuk kesepuluh destinasi itu? Bisa iya, dapat juga gagal. Menjadi inspirasi, mungkin saja. Sebagai *role model*, iya. Tapi mengimitasinya, rasanya muskil. Soal keindahan, Bali mungkin kalah, tapi yang belum dipunyai daerah lainnya adalah kesiapan SDM, manajemen kepariwisataan, tradisi panjang, komodifikasi kreatif, dan otentisitasnya. Terakhir, masalah budaya yang memperantarai agama dan adat sebagai satu kesatuan: dengan budaya, agama menemukan bentuknya, dan dengan agama, budaya mendapatkan maknanya. Seperti puzzle, seperti mozaik. Bagaimana kesiapan daerah di luar Bali menerima turis berbikini jalan-jalan di pusat keramaian, seperti mereka bebas melakukannya di Kuta, Ubud, Sanur, dll? Layak ditunggu



Bali tak butuh festival!

Dalam sebuah diskusi, tersiar kabar, beberapa kepala daerah di Indonesia merasa sedikit kesal. Gelontoran APBD untuk mengadakan ragam karnaval dan festival berbau budaya tak penuh target untuk mendatangkan wisatawan. Dalam setahun, beberapa daerah itu bisa adakan festival 10-15 kali. Tentu cukup menyibukkan tiap bulannya. Dan anggarannya juga tak sedikit.

Beritanya pasti menggema, promosinya juga pasti menggaung. Sayangnya tak cukup menarik untuk dikunjungi, apalagi dengan maksud “menguras” kantong turis, dan menggelembungkan PAD. Apa yang salah? Tak ada yang keliru. Manajemen bagus, apalagi kini banyak EO profesional. Tak sulit meng-*hire* mereka. Keindahan alam menjanjikan, apalagi belum terjamah banyak manusia. Masih otentik dan *genuine*, seperti kebanyakan destinasi wisata di Indonesia. Hutan lebat, bukit ranum, garis pantai memesona, budaya lokal tersebar, semuanya tersedia.

Dari aspek itu, Bali sebagai episentrum wisata dunia bisa kalah. Tapi Bali punya pengalaman sangat panjang, bahkan eksotismenya sudah dieskloitasi dalam majalah “BALI” yang terbit dan *booming* di Eropa pada awal 1900an. Akses yang mudah dari satu lokasi ke lokasi wisata lainnya juga dapat dicapai



dengan cepat. Di Bali, untuk menikmati kesejukan gunung, sejam kemudian berjemur di pantai bukan hal yang *ribet*. Baru-baru saja, terutama Bali Selatan agak macet, tapi itu tidak tiap hari karena kemacetan seperti “mengerti” dengan liburan orang bule pada musim-musim tertentu. Bali punya sikap terbuka terhadap orang luar. Yang tak mengerti menyebutnya permisif. Bali memiliki budaya dan tradisi yang memungkinkan festival itu bisa dirayakan tiap hari. Di depan rumah, di depan pintu hotel, depan jalan masuk café yang hingar bingar, orang Bali memulai festival kebudayaan melalui *banten saiban*, *jotan*, *segehan* dan *canang*. Lengkap dengan dupa yang terus *mekudus*. Bali, sesungguhnya tak memerlukan festival-festival mahal itu.



.....



3

Perempuan,
Kekerabatan,
Hirarki

Perempuan Bali, siapa menindas siapa?

Perbincangan tentang perempuan Hindu Bali seperti tak ada habisnya. Sudah banyak yang memperhatikannya. Mulai dari penelitian serius, hingga sekadar *orta* di *bale banjar*. Ada juga buku-buku serius yang membicarakan kemuliaannya, tak sedikit novel atau cerpen mengabarkan marginalisasi yang dialaminya. Dua kutub ini seperti tak pernah ketemu. Perempuan Hindu Bali dipuji sekaligus pada saat bersamaan dihina. Kira-kira begitu.

Mahasiswa saya melalui karya skripsinya pernah dengan sangat yakin membilang bahwa *Sarasamuscaya* adalah kitab yang melecehkan perempuan. Menurutnya ada 19 sloka yang menceritakan aib perempuan. Lalu ia menyitir kitab lain, dan dengan keyakinan yang sama, ia katakan perempuan itu sangat mulia. Bahkan upacara tidak akan berhasil jika perempuan tidak dihormati. Kitab lain yang dikutipnya bahkan lebih dahsyat lagi. Laki-laki tak akan pernah bisa memasuki surga jika tak didampingi perempuan sebagai istrinya. *Nah*, begitulah gambaran nyata banyak orang tentang perempuan Hindu Bali.

Sejak dulu sekali, wacana seperti ini terus menjadi topik hangat. Tak pernah berhenti dan berakhir. Munculnya gerakan

.....

feniminisme dan kesetaraan gender masih belum mampu membuat keadaan menjadi seimbang, apalagi perempuan diposisikan lebih tinggi dari lak-laki. Khusus untuk kasus Bali, struktur kebudayaan patrilineal/patriarki dianggap sebagai pemantik masalah ini menjadi problematik. Bahkan ketika mereka diangkat dan dikukuhkan sebagai *sentana*, posisi sosialnya juga belum ajeg. Pengakuan dan legalitasnya hanya dalam hukum adat Bali, tetapi tidak di dunia nyata yang sebenar-benarnya. Siapa menindas siapa akhirnya menjadi tak jelas. Karena itu, isu kesetaraan akan terus hidup. *Mbulet*.



Saat Nateng Dirah geram, berhati- hatilah!

Pada masa kerajaan Daha di Kediri, ada sosok perempuan yang dianggap menakutkan, penebar bencana. *Teluh desti* dan *pengeleakan* ia kuasai. Ia pun mampu membuat desa dan warganya kalang kabut seorang diri. Sosok itu adalah Nateng Dirah. Karena ia seorang janda tua, ia juga disebut Rangda. Nateng Dirah sering membuat banyak orang sakit dan meninggal. Bahkan petani tak bisa panen karena hama yang dibuatnya. Menyeramkan. Itulah legenda Calonarang yang klasik di tanah Jawa sejak abad XII.

Kegeraman Nateng Dirah sebenarnya juga sangat sepele. Anaknya yang rupawan, Ratna Manggali dijauhi para pemuda desa karena dianggap mewarisi ilmu hitam darinya. Bahkan Ratna Manggali juga distigma bisa *ngeleak* seperti ibunya. Ratna Manggali akhirnya menjadi perawan tua dan diolok-olok sebagai anak penjahat. Nateng Dirah tidak terima, dan bilang ini tidak adil. Masyarakat telah salah memperlakukannya sebagai seorang ibu dan perempuan. Telah terjadi diskriminasi gender dengan *stereotype* bahwa apa yang dilakukannya sebagai seorang ibu serta merta akan bermutasi kepada



Bukankah seorang anak memiliki dunianya sendiri, dan ketika terlahir akan menjadi milik kehidupan? Batinnya. Maka ia harus melawan ketidakadilan dan diskriminasi gender ini. Sayangnya memang dengan cara yang salah. Tetapi hanya itu yang bisa diperbuatnya untuk melindungi anak perempuan kesayangannya.

Atas sepak terjangnya yang merugikan itu, raja Airlangga ketika itu meminta Mpu Bradah, penasehatnya untuk menghentikan si Rangda tua. Maka diutuslah muridnya, Bahula. Atas saran Mpu Bradah, Bahula diminta mengawini Ratna Manggali sekaligus mengambil pustaka rahasia yang membuat Nateng Dirah sakti mandraguna. Epilog legenda ini sudah dapat ditebak. Nateng Dirah dapat dikalahkan Mpu Bradah. Bahula pun memperistri Ratna Manggali dan hidup bahagia. Tapi masalah diskriminasi gender, Nateng Dirah sudah lama menolak, ia geram tak ketulungan. Jadi, ini bukan isu yang anyar.



Perempuan Bali: mana tubuhmu, mana jiwamu?

Bagi orang luar Bali, perempuan Hindu Bali itu tangguh, sangat perkasa. Mereka dilihat pekerja keras. Laki-laki Hindu Bali dituduh pemalas, doyan sabung ayam. Mungkin ada benarnya, tapi kini sudah mulai banyak berubah. Laki-laki Hindu Bali sudah mulai meninggalkan stigma itu, meski tak sepenuhnya juga, terutama di pelosok desa dan perkampungan. Meski begitu, tetap saja perempuan Hindu Bali dipandang inferior. Pandangan minor yang sama juga berlaku di lingkungan luarnya. Misalnya, pemberian kuota 30% bagi perempuan di legislatif adalah juga bentuk lain dari pengingkaran bahwa laki dan perempuan itu setara lahir batin. Tapi masalahnya banyak juga perempuan yang tidak memahami persoalan yang dihadapinya sendiri.

Terminologi cantik itu putih dan langsing misalnya, ternyata tidak saja dihembuskan oleh laki-laki, tetapi juga perempuan sendiri. Akibatnya laki-laki berjuang mendapatkan perempuan idaman yang dikonstruksinya sendiri dan perempuan bersusah payah memenuhi harapan laki-laki dan dirinya sendiri. Bagi yang



percaya hasil instan, mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan apa saja, sekadar memenuhi hasrat biologis. Akhirnya obat kecantikan, krim pemutih kulit, dan kapsul pelangsing tubuh menjadi asupan tak berguna. Tak sedikit yang merana karena tak mendapatkan hasil seperti dipromosikan foto model dalam iklan. Bagi mereka, lebih penting tubuh daripada jiwa.

Sejak lama sekali, para filosof juga “berkelahi” mana lebih utama, jiwa atau tubuh? Ada ahli menyebut, tubuh itu penjara bagi jiwa. Yang lain menganggap jiwa lebih penting karena ia abadi, sedangkan tubuh bisa rusak. Agama-agama besar semitik juga belum sanggup memberikan penerangan atas dualisme ini. Hindu memberikan jalan tengah dengan menyebut jiwa sebagai yang kekal tetapi tak akan berarti apa-apa jika tak ada tubuh yang memadai untuknya. Melalui tubuh, jiwa bekerja menghasilkan karma baik. Kualitas hidup ditentukan dari karma-karma baik itu. Karena itu, laki-laki dan perempuan, kembalikanlah badan yang sehat untuk didiami jiwa yang sehat pula. Dengan badan dan jiwa yang sehat, kita bisa berkarya dan berprestasi.



Kisah klasik, perempuan Bali di simpang jalan!

Perempuan Hindu Bali adalah makhluk yang mulia. Beberapa kitab suci mengakuinya dengan tegas. Namun beberapa kitab suci lainnya menyatakan sebaliknya. Bagi mereka yang sudah *hopeless*, agama seolah dijalankan dengan sangat “laki-laki”, ajaran agama juga sangat “laki-laki”, dan Tuhan pun sepertinya berjenis kelamin “laki-laki”. Meskipun soal yang terakhir ini sudah dibantah dengan menyebut Tuhan sebagai *ardhanareswari*. Bukan laki-laki, tidak perempuan. Bahkan Tuhan *neti neti*, tidak ini tidak itu. Tetapi tetap saja perempuan tak bisa melepaskan dirinya dari cangkang pujian sekaligus hujatan itu.

Saat perempuan tidak bisa hamil atau mandul, ia harus merelakan suaminya akan mengadopsi anak laki-laki. Atau yang paling celaka, dimadu. Bahkan dahulu kala, jika perempuan tak bisa melahirkan keturunan ia dijuluki *Men Bekung*, sebuah istilah yang meruyak hati. Panggilan *bekung* adalah siksaan karena ia merasa tak bisa membahagiakan suami dan mertuanya sendiri. Belum lagi pertanggung jawabannya di ruang sosial: kepada

.....

saudara, teman, dan orang lain yang mengenalnya. Femonema *sing beling sing nganten* yang saat ini menjangkiti anak muda, tidak saja di kota tetapi juga di sudut-sudut kampung terembesi oleh pikiran sempit ini. Namun, saat ia mampu melahirkan banyak anak, ia juga dijuluki *Men Brayut*, istilah yang merujuk sosok seorang ibu yang dikerubuti bayi dan anak-anaknya yang masih kecil. Sebuah gambaran tak mampu merawat banyak anak. Nama *Men Brayut* itu sama menyakitkan dengan *Men Bekung*.

Saat ini, perempuan Hindu Bali sudah banyak bekerja, beberapa di antaranya mungkin “mengalahkan” karir suaminya. Tentu pujian sebagai perempuan yang seolah mendobrak tradisi sering dialamatkan kepada sosok-sosok progresif ini. Namun sayang ketika memasuki struktur kebudayaan patrilinealnya, mereka itu kembali menjadi pesakitan. Misalnya, cita rasa dan standar yang dibuat bersama antara laki-laki dan perempuan sendiri adalah bisa *majejahitan*, mampu bikin *banten* sendiri, dan sanggup melaksanakan seluruh pekerjaan domestik lainnya. Kemunculan *upakara online* dan *upakara swalayan* seolah menjadi pembenar dari ketidakmampuan generasi perempuan (baik dari anak-anak hingga ibu-ibu) untuk belajar membuat *banten*.



Astika, penebus dosa yang tak normal

Jaratkaru, seorang brahmacari, “jalan-jalan” ke surga dan neraka. Pada suatu tempat yang mengerikan ia menemukan sepasang orang tua menggelayut. Kepalanya di bawah, kakinya terikat di atas, di antara pohon-pohon bambu yang di bawahnya banyak tikus mengerat. Pelan tapi pasti pangkal bambu-bambu itu akan terpotong. Dan kedua arwah orang tua akan jatuh ke jurang yang penuh duri, keris, dan beling-beling. Jaratkaru kaget tak kepalang karena keduanya adalah orang tuanya sendiri. Arwah kedua orang tuanya lalu bercerita. Mereka akan terbebas dari derita ini jika Jaratkaru, anak lelaki semata wayangnya yang lebih memilih *sukla brahmacari*, mau kawin dan memiliki anak laki-laki.

Jaratkaru sedih. Jika ia kawin maka ia melanggar *sasananing kawikuannya*. Jika ia tak kawin, ia melihat sendiri orang tuanya tak akan bebas dari penderitaan. Lalu ia bersumpah akan kawin tetapi dengan satu syarat, mengawini orang yang bernama sama dengan dirinya. Sumpah yang terasa janggal.

Lama ia mengembara, naik gunung, masuk hutan dan menyeberangi sungai. Bertahun-tahun. Hingga suatu saat ia menjumpai Nagini Jaratkaru Dewi. Ia adalah putri cantik raja para naga, Basuki. Upacara perkawinan segera dilangsungkan.



Setahun kemudian lahir Sang Astika, seorang putra yang akhirnya membebaskan orang tua ayahnya. Jaratkaru pun kembali menjalankan kewajiban *bhiksukanya* setelah mengawini perwujudan karakter seorang putri, bukan seekor naga yang kasat mata. Dan Astika adalah seorang suputra, penebus dengan cara yang tidak normal. Kadang, keadaan seperti Astika menjadi pengecualian yang niscaya, seperti Erawan yang lahir dari perkawinan Arjuna dengan Dewi Ulupi, putri raja ular. Atau Gatotkaca yang lahir dari Bhima dengan perempuan raksasa, Dewi Hadimbi. Nagini Jaratkaru Dewi, Dewi Ulupi, Dewi Hadimbi adalah perwujudan-perwujudan karakter, dan dari mereka lahir para suputra: Sang Astika, Sang Erawan dan Sang Gatotkaca.



Suputra itu bukan hanya anak laki lho!

Sebuah keluarga Hindu di Bali yang baru kawin akan bersemangat memiliki anak laki-laki. Bagi mereka, jika anak pertama lahir laki-laki, dunia sudah terasa damai. Tetapi jika tidak, mereka akan sekuat tenaga memilikinya. Akibatnya, ada keluarga yang sampai punya anak lebih dari empat hanya untuk memiliki anak laki-laki. Jika tak kesampaian, mereka akan menebusnya dengan *meras sentana*, biasanya anak laki-laki saudara dekatnya. Ini adalah salah satu mekanisme adat untuk menyelamatkan status *purusha* sebuah keluarga Hindu.

Memiliki seorang anak laki-laki bagi keluarga Hindu adalah pencapaian besar. Bahkan anak laki-laki itu kelak menentukan status dan keberhasilan orang tuanya. Semakin anak laki-laknya sukses, orang tuanya merasa mendapatkan dampak yang sama. Mereka oleh lingkungan sosialnya juga akan dianggap berhasil. Di masa lalu, status laki-laki akan ditentukan oleh kedudukannya di *bale banjar*. Makin bisa duduk di bagian depan saat *sangkep*, seorang laki-laki akan dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Ini adalah satu standar bersama. Dan istilah suputra hanya disematkan pada pundak laki-laki, akhirnya.

.....

Karena anak laki-laki menjadi tujuan melanjutkan keturunan, maka bagi keluarga Hindu yang tidak memiliki anak laki-laki selain *memeras sentana*, juga meminta salah satu anak perempuan, biasanya yang bungsu, untuk tinggal di rumah. Anak perempuan secara adat akan dijadikan *purusha* dan mendapat warisan seperti anak laki-laki lain kelak saat orang tuanya meninggal. Dengan cara ini, lembaga perceraian tidak akan diambil hanya karena tidak memiliki keturunan. Masalahnya adalah apakah suputra itu harus laki-laki atau perempuan? Kitab suci Manawadharmasastra dengan tegas mengatakan tujuan perkawinan adalah melahirkan seorang anak yang akan meneruskan tradisi leluhurnya. Tak disebutkan anak itu harus laki-laki, karena anak perempuan pun bisa menjadi suputra. Semua anak haruslah dididik agar menjadi suputra.



Perempuan Hindu itu “sakti”, masih tak percaya?

Tak perlu ada penyesalan atas struktur patrilineal yang sepertinya sudah *given*. Seorang teman dekat, novelis hebat, Oka Rusmini menyarankan perempuan Hindu Bali harus mempersiapkan diri dengan baik melalui ekonomi dan pendidikan. Dengan ini, ia akan siap menghadapi berbagai kemungkinan dari resiko sistem patrilineal ala Bali. Stigmatisasi atas perempuan bukanlah alamat buruk bagi perempuan untuk terus bertumbuh. Karena pesaing perempuan bukanlah laki-laki saja, tetapi kaumnya dan dirinya sendiri. Sayangnya banyak perempuan dalam sebuah pemilihan anggota organisasi misalnya, malah menawarkan diri menjadi seksi konsumsi saja, paling tinggi bendahara. Jarang, sangat jarang yang mau mengajukan peran sebagai ketua. Padahal di masa lalu, banyak perempuan Hindu pernah membuat karya agung.

Dalam tradisi orthodox Hindu, seperti dijelaskan Sarvanukramanika, setidaknya terdapat 20 wanita yang dianggap memiliki intuisi tajam sebagai Maha Rsi yang ikut berperan dalam menyusun Rgveda. Beberapa yang menonjol, antara lain Lopamudra, Visvavara, Sikata Nivavari dan Gosha. Mereka ini

.....

diyakini sebagai perempuan hebat yang benar-benar hidup pada masa itu. Penyusun kitab suci Rgveda X.145 dan 159 juga diyakini seorang perempuan, meskipun namanya diragukan apakah dia bernama Indrani atau Sachi. Bahkan perempuan bernama Gargi dan Maitreya juga pernah disebut-sebut berdialog dengan Rsi Yajnavalkya dalam usahanya menemukan kebenaran yang absolut. Kumpulan dialog antara mereka ini terhimpun dalam Maitri Upanisad. Tokoh perempuan, seperti Sulabha Maitreyi, Vadava Prathiteyi dan Gargi Vachaknavi sampai saat ini juga masih mendapat penghormatan agung dari para penulis dan sarjana yang berpandangan tajam yang selalu ingat akan kewajibannya untuk berdoa saat *brahmayajna*.

Esok, bagaimana postur perempuan Hindu akan sangat tergantung pada dirinya sendiri, dan kesempatan-kesempatan yang dikelolanya menjadi peluang untuk berprestasi. Pada akhirnya, masa depan yang cemerlang akan ditentukan ditangannya sendiri. Sehingga tak perlu ia berkelahi dengan laki-laki, yang janggankan diminta lebih rendah posisinya dari perempuan, setara pun laki-laki akan tetap *ogah*.



Dilema akut perempuan tri wangsa

Di satu daerah di Bali timur yang pernah saya observasi, terdapat banyak perempuan setengah baya dalam sebuah *griya*. Mereka duduk-duduk di teras, bersendagurau dengan saudara perempuannya yang lain. Ada juga yang sambil mencari kutu di rambut. Tampak mereka sangat menikmati kehidupannya itu. Namun bisik-bisik penjaga warung kecil di depan *griya* itu, perempuan-perempuan itu belum menikah. Dan pemandangan itu saya temukan lebih di satu *griya*. Ironis, tentu. Tapi tak semudah hanya menontonnya. Kompleks. Dan pemandangan itu, lagi-lagi soal struktur sosial: perkawinan.

Perkawinan di Bali sangat berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut daerah lain, terlebih di dunia Barat, yang siapa kawin dengan siapa adalah soal biasa dan ringan. Di Bali, perkawinan itu perlu direncanakan matang, termasuk memikirkan *lelintihan* dan *soroh* calon pengantinnya. Tak bisa seorang laki-laki *jaba* mengawini begitu saja perempuan *tri wangsa*. Sebaliknya, laki-laki *brahmana* bisa bebas memilih perempuan yang dicintai untuk dikawininya. Namun perempuan *brahmana* tidak bisa memilih laki-laki yang diidamkannya kecuali sesama *wangsa*. Bahkan ketika dikawini laki-laki *ksatria* dan *wesya* yang sebenarnya masuk golongan *tri wangsa* juga tetap dianggap

.....

leteh sehingga disebut *nyerod*. Karena itu, tak terbayangkan jika perempuan *brahmana*, *ksatria* dan *wesya* dikawini laki-laki *jaba*. Lebih menyakitkan.

Jika kemudian banyak ditemukan perempuan, terutama *brahmana* memilih menjadi perawan tua, itu pilihan paling sulit. Ada dilema yang sangat pelik. Meski larangan perkawinan beda *wangsa* tidak diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, tetap saja ingatan kolektif masyarakat tentang ancaman dan hukuman perkawinan ini masih membekas. Hasil penelitian saya menunjukkan betapa ada kegelisahan dalam batin perempuan yang berani *nyerod*. Mereka tak pernah bisa menyembunyikan rasa sakit meskipun hidup berkecukupan, bahkan mapan dengan laki-laki yang tidak *sewangsa* dengannya. Tampak bahagia, tapi di batin terdalamnya, siapa yang bisa menduga.



“*Kepanesan*”, *mitos atau fakta?*

Dalam penelitian yang pernah saya lakukan, seorang pegawai Dukcapil yang baru saja pindah ke Bali heran. Dia dari Jawa Barat, sebut saja namanya Nina. Beberapa orang datang dengan nama yang berbeda dari akte kelahirannya. Tapi tak apalah karena dia memang tidak tahu. Ada banyak nama *jero*, ada juga nama yang seperti “diturunkan” derajatnya dari nama aslinya, padahal nama-nama baru itu tak mengubah nama asli di akte. Yang berubah mungkin perasaan saja. Jika dinaikkan rasanya lebih terhormat, diturunkan seperti hinaan. Tapi benarkah?

Perkawinan di Bali memang unik, agak sama juga sebenarnya dengan Jawa yang harus memperhitungkan *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Kalau di Bali, asal usul kelahiran berdasarkan *lelintihan* perlu dipertimbangkan. Karena itu, ada kehati-hatian juga dalam memilih pasangan hidup. Sayup terdengar, perempuan dari klan *pande* jika dinikahi laki-laki bukan *pande*, juga dimitoskan akan “*kepanesan*”. Bahkan saya yang mengawini perempuan China juga sempat dilarang keluarga karena bisa membikin keluarga “*panes*”. Kata mereka, raja Bali telah bertitah agar *krama* Bali tidak mengawini perempuan China. Mereka takut *tulah*. Begitulah di Bali.

.....

Karena itu, seorang perempuan *jaba* jika dikawini laki-laki *tri wangsa* akan diberikan nama baru yang kurang lebih bermakna harum dan wangi, dengan tambahan *jero* di depan namanya. Ada kesepakatan bahasa, kata *jero* yang berarti di dalam itu wangi dan harum. *Utama mandala* juga sering disebut *jeroan* karena diyakini paling suci, hening dan *sunya*. Yang di luar *jero* atau *jaba* adalah tempat biasa. Orang *jaba* adalah orang biasa yang ada di luar *jero*. Kata *jaba* juga sama artinya dengan *jawa*, yang juga berarti luar. Sehingga di Bali, setiap orang luar Bali sering disebut *nak jawa*, meskipun ia berasal dari Makassar atau Lombok. *Nah*, perempuan diberi nama *jero cempaka*, *jero sandat*, *jero sekar*, *jero wangi*, dlsb untuk menaikkan status sosial itu, bukan mengubah nama aslinya. Begitu juga perubahan nama perempuan dari *tri wangsa* yang kawin *nyerod* diturunkan menjadi sama dengan nama suami. Tak ada yang berubah, kecuali perasaan saja, sebenarnya



“Melawan mitos” malah dengan mepayas agung

Dulu, *payas agung* itu hanya boleh digunakan para bangsawan atau *tri wangsa*. Tak boleh orang biasa (*jaba*) menggunakannya karena akan dianggap menyama-nyamakan diri dengan mereka yang berdarah suci. Tak boleh, karena akan disebut *amada-mada ratu*. Jika dilanggar, bisa dihukum berat. Paling tidak akan *kepongor*. Kepanesan bagi yang berani memakai pakaian kebesaran itu. Mirip di masa lalu yang tidak boleh menunjuk-nunjuk *tri wangsa* dengan jari telunjuk atau rumah orang *jaba* terpaksa minggir agar tak berhadap-hadapan langsung dengan *griya* sebagai representasi *surya* (matahari).

Kini, *payas agung* atau pakaian adat yang sakral dan berharga mahal itu sudah banyak disewakan dan dijual. Bahkan, para turis dan wisatawan juga sering menggunakannya untuk sesi foto, baik di studio maupun *outdoor*. Bisa juga untuk *prewedding*. Intinya digunakan tidak lagi seperti di masa lalu, tetapi lebih sebagai bagian dari hiburan dan untuk bersenang-senang. Ada saatnya *payas agung* itu untuk upacara sakral dan dihormati, apalagi tiap daerah punya nilai historis lengkap dengan mitosnya.



Masalahnya, lagi-lagi komodifikasi. *Payas agung* menjadi lumrah karena ada permintaan, tak peduli status kewangsaannya lagi, yang penting ada modal berupa uang untuk membeli atau hanya menyewa. Bahkan saat ini tempat penyewaan busana adat Bali lebih banyak dimiliki oleh kalangan *tri wangsa* sendiri. Dengan posisi *jaba* yang makin kuat secara ekonomi, dan pengaruh gaya hidup yang begitu kencang, memungkinkan komodifikasi ini berjalan mulus. Meskipun dalam pikiran kolektif orang Bali, *payas agung* dalam perkawinan tetap adalah simbol yang menjadi “milik sah” *tri wangsa*. Ketika standar atas status sosial bersama telah ditentukan, terlebih hanya dengan properti, yang karena kemapanan ekonomi bisa diraih oleh siapa saja, maka *mepayas agung* untuk sekadar menunjukkan simbol status sosial tinggi menjadi lumrah pada akhirnya. Tak mengherankan, orang kampung yang baru jual tanah warisan bisa *jor-joran* menggunakan sesuatu yang kadang tak dimengertinya. Sepanjang semesta menyetujui, apapun bisa terjadi.





4

Delusi,
Primordialisme,
Dialektika

Menjadi Jero itu panggilan hati, gaya hidup, atau menghindari masalah?

Kata *jero* di Bali sudah sangat populer. Saat saya pulang kampung, juga langsung *diledak*, bukan saja oleh teman-teman di Bali, tapi juga teman-teman di Jakarta, yang *notabene* jauh dari urusan ini. “*Pulang kampung mau jadi jero ya*”, begitu rata-rata *ledakan* mereka. Memang, pulang kampung di usia yang sangat produktif adalah anomali dengan meninggalkan karir di ibukota. Saya harus pulang untuk menjemput takdir sebagai anak laki-laki tunggal dan meneruskan tradisi orang Bali: tinggal di rumah tua.

Saya mungkin tak sampai gegar budaya ketika melihat begitu bersemangatnya banyak orang menampilkan diri sebagai *jero*, entah *jero mangku*, *jero balian*, dan *jero* lain yang berhubungan dengan dunia supranatural. Berbeda dengan sebutan *jero* karena kedudukan tertentu, seperti *jero bendesa*, *jero kelihan*, dlsb atau karena panggilan sopan dan hormat.

.....

Tampaknya ada eforia, ada gairah yang begitu besar. Mungkin bisa menjadi satu indikator tingkat religius dan spiritual orang Bali sedang tinggi. Mungkin, tapi entahlah. Menjadi *jero* adalah hak siapa saja. Tak boleh dilarang. Karena ada juga orang yang sudah *kesudi* menjadi *pemangku* bahkan sejak dalam kandungan, mendapatkan *pawisik* langsung dari Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, faktor keturunan, usaha yang sungguh-sungguh dengan belajar khusus, atau sebab-sebab lain yang dapat diterima baik *sekala* maupun *niskala*.

Namun ada juga yang menduga menjadi *jero* karena ikut-ikutan. Misalnya, karena standar nilai yang seolah “disepakati” bersama bahwa religiusitas ditentukan oleh pakaian putih-putih, sering *tirthayatra*, *kedewan-dewan*, sedikit-sedikit *kerauhan* dan kesurupan. Lalu dilegitimasi dengan sengaja menggunakan berbagai properti yang dikesankan *tenget*. Akhirnya, menjadi *jero* karena panggilan gaya hidup saja. Tak jarang tren ini diikuti anak-anak muda dan mereka yang belum siap mental. Ketika tersiar ada perselingkuhan di kalangan *jero*, menjadi penyuka sesama jenis, atau *jero* anak muda yang kerjanya *selfie* dan bikin status *nyeleneh* di medsos, mungkin itu semua adalah dampak yang tak dapat dihindari. Menjadi *jero* hanya untuk menghindari masalah juga ada, dan itu banyak.



Speaker Tri Sandhya itu bukan alarm!

Bagi kaum urban yang tinggal diperantauan luar Bali, sembahyang adalah satu masalah tersendiri. Tak seperti umat lainnya yang bisa sembahyang di satu tempat ibadah. Mereka tak bisa sembahyang paling banter karena perbedaan mashab saja, selebihnya relatif tak masalah, tak serumit umat Hindu. Di Jakarta dan daerah lainnya, biasanya ada pura umum berupa padmasana. Itu pun tak banyak, hanya di ibukota propinsi atau kabupaten. Tak ayal, pura itu akan penuh oleh umat Hindu dari pelosok daerah. Tentu berbeda, sangat berbeda dengan di Bali. Karena itu, kami biasanya akan menyempatkan sembahyang di rumah. Biasanya pagi atau malam sepulang kerja dan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Tri Sandhya dan *kramaning sembah* rutin dilakukan setiap hari di rumah.

Sejak diperantauan, saya selalu mengajarkan anak-anak bahwa di Bali mereka akan melihat orang-orang bersembahyang setiap saat. Selalu ada momen, bahkan tiap hari, umat Hindu di Bali melaksanakan persembahyangan. Kalau tidak di pura, ya di rumah masing-masing. Ya, setiap hari! Pesan saya kepada anak-anak agar ketika pulang dan tinggal menetap di Bali, mereka harus siap dan ikut seperti saudara, teman dan orang sekitarnya.

.....

Saatnya kami hidup menetap di Bali. Setiap sore, kami pun terus menjalankan rutinitas sembahyang bersama. Tri Sandhya, lalu *kramaning sembah*. Setelah sebulan, anak lelaki sulungku bertanya: “*Kata ayah, orang Bali tiap hari tiga kali sembahyang. Kok hanya terdengar bunyi speaker yang mengumandangkan Tri Sandhya, tapi orangnya gak ada satupun yang sembahyang*”. Ini pertanyaan mudah tapi susah memberikan jawaban detil untuk anak berusia 10 tahun. Saat itu, 2016 ia baru Kelas 7 SMP. Entah kini, saat ia akan sembahyang bersama di sekolah dan sorenya di rumah bersama kami. Yang jelas, saya tidak menjawab pertanyaan anakku bahwa *speaker* yang terpasang disetiap *bale agung pura desa* itu bukan sebuah alat pengingat waktu atau *alarm* yang berbunyi tepat waktu pada pukul 06.00 pagi, 12.00 siang dan 18.00 sore.



Budaya bersih di pura, kok sulit amat?

Suatu hari, saya dan keluarga sembahyang ke pura kawitan di luar Denpasar. Karena di kampung juga ada *odalan*, kami *tangkal* di hari terakhir. Sekalian untuk menghindari kepadatan *pemedek* yang biasanya berdesakan. Padahal yang saya dengar, segala macam jurus sudah dilakukan panitia untuk memperlancar *odalan*, termasuk dengan kartu. Tetap saja *crowded*. Tiap tahun jumlah *pemedek* selalu bertambah. Bahkan banyak yang datang dari luar Bali. Saya menemui salah seorang *pemedek* yang *tangkal* dari Nusa Penida, bahkan dari Lombok dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Soal sekalian mereka sebenarnya pulang kampung, itu urusan lain.

Membludaknya *pemedek* tentu merepotkan panitia *pidalan*. Belum lagi urusan lain yang tak kalah menyibukkan. Ya parkir, pedagang, hingga arena judi macam bola adil hingga *tajen*. Di Bali pemandangan seperti ini sudah satu paket. Tak aneh ketika kami sembahyang, tumpukan *canang* saat itu mencapai 30 cm. Menjadi bau karena saat itu musim hujan, kadang siangya terik sehingga bau makin anyir menyengat. Karena ada



pembusukan, lalat pun mulai berseliweran. Tantangan, sekaligus ujian untuk memusatkan diri memuja Tuhan.

Bagi *sang wikan*, kondisi itu tentu tak soal. Baginya semua maya, bukan? Tapi *sang wikan* itu jumlahnya minoritas, masih sangat banyak umat awam yang jika sembahyang mendambakan lingkungan pura yang asri. Bagi mereka, pura itu tempat yang menyenangkan. Namun lingkungan pura yang indah terasa kurang jika tak dimulai dengan budaya bersih dimulai dari *pemedek* sendiri. Misalnya, secara refleks mereka akan membawa sendiri sampah bekas sembahyang atau tidak kencing sembarangan di lingkungan pura. Budaya bersih ini hanya akan bisa dilakukan jika di pura tersedia kamar mandi atau WC, tempat sampah, tempat membersihkan tangan dan kaki sebelum *ngaturang bhakti*. Sebuah kebahagiaan, jika tak bisa dibuat dari dalam jiwa, bukankah ia bisa datang dari luar tubuh. Mari budayakan hidup bersih dan sehat tidak saja di rumah, tapi juga tempat-tempat suci.



Karang Suwung, kok makin suwung?

Bali dijaga dari segala penjuru arah mata angin. Para dewa dan pura, baik Sad Kahyangan maupun Dang Kahyangan ada di mana-mana. Tak ada sejengkal tanah yang tak suci. Karena itu, orang Bali sangat berhati-hati dengan tanah, apalagi mencurinya. Bahkan dalam membangun rumah letaknya ditata sedemikian rupa agar *nganutin lontar* dan menggunakan *sikut* dengan menyisakan *adepa* tanah pekarangan. Ini agar ada ruang hampa di tembok *penyenger*. Kini, terutama di komplek-komplek perumahan, tembok pagar dengan bangunan sudah menyatu, tak ada lagi sisa. Halaman rumah juga sudah dipaping atau dibeton. Tanaman dan bunga hias terkurung dalam pot. Jika musim kemarau, hawa rumah makin panas, saat musim hujan air menjadi rob karena tak ada resapan.

Dulu, anak-anak dibiarkan bermain di tanah, bahkan karena tak tahu mereka terbiasa mengisap debu. Orang tua akan menyebutnya *ngisep sarin buk ibu perthiwi*. Anak-anak itu tidak sakit, malah diyakini makin kuat karena bertemu dengan tanah. Begitu juga ketika hujan-hujan, mereka tidak sakit. Kini pemandangan itu menjadi masalah besar dan serius. *Saking* tak mau bertemu ibu perthiwi, di dalam rumah pun, turun dari tempat

.....

tidur sudah menggunakan sandal tipis khusus. Selain karena polusi alam, kini orang rentan sakit mungkin juga karena cara hidup, pola makan, dan bagaimana memandang dirinya di alam.

Suasana di rumah juga menjalar di ruang sosial, di area publik. Dulu hampir di semua desa adat masih tersedia *karang suwung* yang sengaja dikosongkan warga. Kalau tidak diperempatan ada lahan yang luas, di *teben desa* ada saja *karang suwung*. Entah sebagai kebun kosong, tempat bermain dan olah raga atau sekadar bertemu pulang kerja. Kini *karang suwung* itu sudah banyak beralih fungsi. Selain dimanfaatkan desa agar produktif, misalnya dijadikan pasar dan parkir tapi juga sudah banyak dibeli untuk perumahan atau kluster-kluster perumahan kecil. Tiba-tiba saja daerah yang dalam sejarahnya tak pernah banjir, kini dengan hujan deras sebentar saja sudah banyak genangan, padahal Bali itu kecil dan dikelilingi pantai. Juga banyak aliran sungai. Tampaknya untuk beberapa daerah tertentu, Bali harus kembali punya *karang suwung-karang suwung*, meskipun tak seluas masa lalu.



Sigug itu memuji atau menghina sih?

Pagi menjelang siang, kira-kira pukul 9, saya mendengar tetangga sedikit berisik. Hari itu libur, saya sedikit bermalas-malasan di rumah. Dan “pertengkaran” tetangga itu lama-lama cukup mengganggu. Sudah mulai terdengar saling ejek. Saya sedikit kaget, lalu hanya ikut *nguping*, karena sepertinya mereka tidak membutuhkan penengah. Ternyata masalahnya sepele saja.

Alkisah. Lampu depan tetangga di kiri rumah saya biasanya menyala hingga siang. Sepertinya tangan mereka tak begitu refleks untuk memencet saklar. Mereka sering lupa mematikan lampu. Dan kejadian ini sudah lama berlangsung. Bukan baru-baru ini saja. Saya pun kalau lewat depan rumahnya sering *mekaukan* untuk mengingatkan. Entah angin apa, tiba-tiba tetangga di kanan rumah saya hari itu agak gundah. Lalu menumpahkan kata-kata yang sepertinya lama ia pendam: “*Mih kali jani lampun timpale nu ngendih. Mirib sing kuangan tai apa lebihan pipise kal anggo mayah listrik*”. Seketika orang di dalam rumah, menyahut pedas: “*Adi awake repot san. Pis-pis icange, nyak kenken ja de awake milu-milu nah. Ipidan awake nyujukang penjor aeng gati, icang sing je ngugul, apa buin tawang penjore to kayang jani onden mebayah*”. Sahut-sahutan ini dapat diduga kelanjutannya, seperti apa drama telenovela di pagi hari.



Begitulah bahasa orang Bali. Jika tak hati-hati dan memahami struktur bahasanya, kadang hati bisa panas dingin. Antara memuji dan menghina itu sangat tipis bedanya. Bahasa *sigug* itu antara memberikan pujian yang sebenarnya, atau ada sisipan untuk menghina. Atau juga menghina tetapi dengan cara memuji. Karena *sigug*, dan juga *ngewalek*, Pan Balang Tamak, si tokoh legendaris yang selalu luput dari sanksi adat sanggup memanfaatkan situasi terjepitnya dengan sangat baik. Ia bisa berdalih, bahkan dengan cara yang *sigug*.



Mimikri: meniru atau mengejek?

Dalam sebuah pengalaman meneliti, saya terhenti sejenak untuk memperhatikan sebuah *kori agung*, lengkap dengan properti rumah yang tak biasa bagi seorang *jaba*. Sejurus kemudian, ada penjaga rumah yang mengusir saya agar tak memotret. Tapi tak disangkanya, saya malah sedang mewawancarainya karena ia terlalu banyak bicara. Katanya, rumah itu milik pengusaha minyak yang sukses, kebetulan dia orang *jaba* dari Denpasar. Saya diminta untuk tidak mempublikasikan model rumah agar tak ditiru orang lain. Penjaga itu juga bercerita, sang tuan rumah ingin menunjukkan bahwa dia adalah keturunan langsung bangsawan Jawa yang “lari” ke Bali. Tentu sejarah tentang ini sudah banyak yang tahu. Tapi bagaimana si empunya rumah mempresentasikan dirinya sebagai bagian dari bangsawan Jawa, meskipun kini sebagai *jaba*, itu jauh lebih menarik. Mungkin fakta seperti ini hanya akan diklaim *jaba* yang sukses.

Pada kesempatan lain, saya dibuat terkaget-kaget dengan beberapa teman *jaba*, meski dengan nada bercanda minta dipanggil *Rah Tu*, yang lainnya minta disebut *Gung De* dan *Gus Mang*. Kata mereka, panggilan ini untuk *ngewalekin* mereka (entah *jaba*

.....

maupun *tri wangsa*) yang di jaman *android* ini masih saling berebut soal status kewangsaan. Saling memanggil dengan panggilan halus itu, bagi mereka bukan untuk gagah-gagahan karena disela-sela obrolan, bahasa-bahasa kasar ala kaum kebanyakan juga terus terselip. Bagi mereka, sudahlah. Soal yang satu ini tak akan pernah hilang di muka bumi Bali. Biarkan saja, tak perlu sampai dicari-cari sampai hilang akal, tak penting dipertahankan sampai rasio tumpul.

Memang dulu sempat beredar kabar, Gubernur Bali ingin menertibkan masalah ini, meski akhirnya menguap juga, yaitu nama-nama *puri* dan *griya* sebagai tempat tinggal hanya untuk kalangan *tri wangsa* saja. Tapi daya tahan itu jebol juga. Kini, hampir di setiap sudut tanah strategis, bahkan yang dulunya kawasan hijau telah berubah fungsi menjadi komplek perumahan dengan nama Griya Harapan, Puri Residence, dlsb yang penghuninya kebanyakan orang *jaba*. Bahkan juga, *jaba* yang punya uang berlimpah, beli sebidang tanah, bikin kluster dengan enam rumah saja, jadilah Puri Permata. Mereka melakukan memikri dengan maksud meniru agar setara dengan standar yang diciptakan bersama, tapi saat bersamaan juga untuk mengejek meskipun tetap merasa tak pantas.



Ngewalek lebih dari sekadar ngorta

Pekerjaan orang kini beragam. Tak seperti dulu. Orang bisa pergi kerja bareng, pulang juga bersama-sama. Jenis pekerjaannya juga sama. Sebagian besar sebagai petani, pedagang atau nelayan. Homogen. Bahkan sepulang kerja mampir dulu ke warung, sekadar *ngopi* atau bertemu dulu sebelum ke rumah. Petani sehabis bekerja di sawah, lalu mandi di aliran sungai atau *telabah*, kadang *nyampur* laki-perempuan, selepas *sandikala* mereka bisa pergi bersama-sama untuk *metuakan*.

Kini tentu pemandangan itu sudah jauh berbeda. Bahkan tetangga sebelah rumah kita sudah tidak tahu bekerja di mana, sebagai apa, dan waktu bekerjanya kapan. Seminggu bisa tidak bertemu. Tempat duduk-duduk di depan *kori* atau *angkul-angkul* sudah jarang diduduki, apalagi hanya untuk *ngorta*. *Bale banjar* juga sama saja, tak seramai dulu. Daripada tidak produktif, banyak *bale banjar* disewakan untuk berdagang, parkir mobil atau tempat berolahraga.

Namun tidak di warung tradisional yang menjual nasi campur, kopi hingga *tuak* dan arak. Warung seperti ini di Bali bukan sekadar warung. Ia bisa menjadi tempat untuk mempertemukan tubuh-tubuh yang lelah, sekaligus mempertemukan berbagai ideologi. Di warung tradisional banyak



hal dari yang *remeh* hingga masalah bangsa dibicarakan. Tak cukup dibaca di koran atau ditonton di tv dan didengar di radio. Informasi itu sepertinya harus diomongkan. Makan nasi campur jadi tak penting. *Ngopi* atau *ngarak* juga tak istimewa. Warung menjadi tempat untuk saling meledek, *ngewalek*. Dan orang-orang tak saling marah. Emosi bisa saja, itu pun kalau sudah minum lebih dari dua seloki, takaran normal penghangat tubuh. *Ngewalek* jauh lebih penting dari pertemuan itu sendiri. Saling *walekin* adalah tingkatan tertinggi dalam menerima kenyataan, karena tak banyak orang sanggup dengan tenang menertawakan dirinya sendiri. Paling mudah memang menertawakan orang lain.



Multifungsi pura di tanah rantau

Manusia Bali adalah makhluk kolektif dan komunal. Nyaris tak bisa hidup dengan satu kakinya secara individual, lalu mengabaikan perannya sebagai makhluk sosial. Mereka umumnya hidup di atas kolektivitas. Mungkin karena bertipe masyarakat agraris, sebagaimana kebanyakan masyarakat rumpun Melayu seperti Indonesia. Saat merantau jauh sekalipun, orang Bali seolah wajib mendirikan *bale banjar*, *pura*, *pasraman*, dlsb.

Tempat-tempat itu adalah episentrum berbagai aktivitas, sosial budaya hingga politik. Namun yang membedakannya, tempat-tempat itu memiliki fungsi lain, bahkan multifungsi. Misalnya, pura di Jakarta bukan saja tempat sembahyang tetapi juga sebagai ruang publik. Tak heran, setiap Sabtu dan Minggu, pura di Jakarta selalu penuh oleh umat. Hanya dengan cara itu, mereka bisa bertemu, beranjangsana, dan mengakrabkan diri, terlebih jika mereka satu daerah, apalagi satu *lelintihan*. Bagaimanapun, tempat global seperti ibukota negara tidak menggerus adab lokal mereka. Wajar, karena itu penanda identitas. Banyak budaya lain juga mengalaminya. Orang Padang

.....

di USA juga akan merindukan rendang, orang Lombok di Jerman akan menginginkan ayam taliwang.

Yang cukup unik, *bale banjar* bukan saja untuk *sangkep* atau rapat arisan *tempekan*, pura sebagai tempat sembahyang, *pasraman* sebagai tempat pendidikan agama, tetapi tempat-tempat itu juga ajang mencari jodoh atau saling menjodohkan anak. Mereka, para orang tua itu, ingin putra-putrinya tetap kukuh dengan budaya leluhurnya, melanjutkan jati dirinya sebagai orang Bali dan umat Hindu, serta ingin anak perempuannya tidak pindah agama dan anak laki-lakinya tidak *paid bangkung*. Bahkan mereka punya jargon yang menggetarkan: “*lahir sebagai Hindu, matipun tetap sebagai Hindu!*”.



Harga mahal sebuah kenyamanan di pura

Hampir semua pura di Jakarta, mungkin juga di daerah lain luar Bali, memiliki fasilitas yang cukup banyak, sesuatu yang malah sedikit ditemukan di Bali. Misalnya, WC atau kamar mandi selalu tersedia. Di Jakarta, tempat ini bukan saja untuk buang hajat tetapi lebih banyak untuk *mesalin* pakaian. Umat Hindu di Jakarta, kecuali yang memiliki kendaraan pribadi, tidak mungkin menggunakan pakaian adat dengan naik motor, seperti dengan bebas dilakukan di Bali, tak pakai helm pula, apalagi *numpang* metromini. Bisa-bisa dianggap aneh dan penghayat aliran sesat. Habis sembahyang, *bija* di dahi dan bunga di kuping saja kadang harus segera ditanggalkan karena alasan-alasan itu. Karena itulah, WC punya fungsi lain.

Sebelum masuk pura, di depan candi bentar di *jaba sisi* biasanya ada pancuran yang digunakan untuk membersihkan tangan dan kaki. Air pancuran dari kran itu bukan *wudhu* sebagaimana umat Islam melakukannya sebelum *sholat*. Air itu untuk membersihkan dan atau menyucikan badan jasmani dari

.....

kekotoran. Datang dari jauh menuju pura biasanya badan, dan juga pikiran, terpapar polusi udara dan debu. Setelah membersihkan diri, tersedia pula *tirtha* yang dipercikkan sebelum melangkah ke *jaba tengah* atau *jeroan* jika pura tersebut hanya memiliki *dwi mandala*.

Masuk ke *jaba tengah*, tersedia pula selendang, dupa dan bunga bagi umat yang tidak berpakaian adat dan tidak membawa sarana persembahyangan. Selanjutnya, semua alas kaki harus dilepas dan diletakkan di tempat yang disediakan, biasanya berupa alas bertingkat. Semua tertata rapih. Sembahyang di *jeroan* akan selalu diawali dengan puja Tri Sandhya, pada pukul berapapun mereka tangkil. Jika *odalan*, persembahyangan akan diisi terlebih dahulu dengan *dharmawacana*. Usai *nunas tirtha* dan *bija*, semua bekas sarana sembahyang dibawa sendiri untuk dibuang ke tempat sampah yang telah tersedia, dan dupa ditancapkan pada tempat yang juga sudah disediakan sehingga kepulan asap dupa akan terus mengalir sepanjang persembahyangan. Di Bali, pura sering dibiarkan lumutan, mungkin agar terlihat *tenget*, *metaksu*, dan baru dibersihkan saat *odalan* atau *rerahinan*, tapi pura di luar Bali selalu tampak rapi dan asri lengkap dengan fasilitas yang memanjakan umatnya.



Di Jakarta, ida bhatara “saling mengunjungi”

Menjadi minoritas selalu tak mengenakan, meskipun Hindu di Jakarta tak pernah mengalami diskriminasi. Bahkan beberapa pura berdempetan posisinya dengan tempat ibadah lainnya. Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta bersebelahan dengan masjid besar. Pura Tirtha Bhuana Bekasi malah satu tembok dengan sebuah gereja. Bahkan di Bekasi itu, setiap enam bulan sekali saat *piodalan*, halaman rumah-rumah penduduk disekitar pura direlakan jadi “parkir musiman”. Ketersediaan lahan yang terbatas tak berbanding lurus dengan *pemedek* yang setiap tahun makin banyak.

Situasi itu disebabkan salah satunya aktivitas unik berupa *ngiring pakuluh*. Jika satu pura melaksanakan *odalan*, maka *ida bhatara* di pura yang lain akan *tangkil* bersama para *pengempon*, *pemangku* dan umat Hindu. Dapat dibayangkan, di Jabodetabek kini ada lebih 15 pura, maka secara bersamaan pula *pemedek* akan terkonsentrasi di satu pura. Jadi, tak ada pura di Jabodetabek yang sepi, karena *ida bhatara* sepertinya “saling kunjung mengunjungi”.



Bagi umat Hindu di luar Bali, pemandangan kolosal ini penting maknanya. Selain menumbuhkan *bhakti*, juga bisa menjadi pertunjukan bahwa “Hindu itu ada” di ibukota. Meski minoritas, ramainya setiap *piodalan* menjadi penanda kesadaran kolektif umat Hindu yang sanggup digerakkan oleh agamanya. Karena itu, saat *tawur agung kesanga*, sehari sebelum Nyepi yang sempat dilaksanakan di pusat ruang publik, seperti kawasan Senayan dan Monas, umat Hindu begitu bergairah untuk menunjukkan ekspresi keagamaannya. Umat Hindu se-Jabodetabek juga tumpah ruah. Tak peduli jika *ogoh-ogoh* yang diusung tiap *banjar* oleh umat lain menjadi tontonan dan hiburan, yang penting “Hindu itu ada”. Jargon penyemangat yang selalu membuat rasa bangga bercampur *jengah*. Sayang, momen seperti itu telah dihapuskan.



Balada Nyepi di tengah kebisingan

Jika di Bali, *catur brata penyepian* bisa dilakukan dengan total, dan bahkan menjadi daya tarik wisata. Di luar Bali tak mungkin melakukannya. Pernah suatu saat saya mencoba *amati gni*. Esok harinya, hampir semua tetangga menanyakan kenapa rumahmu gelap gulita. Bahkan ada yang iseng, apakah listrik belum dibayar? *Ah*, dia pasti bercanda.

Kebetulan saya tinggal di sebuah kompleks perumahan, dan satu-satunya Hindu. Beberapa tetangga ada yang Kristen. Persis depan rumah ada musholla, di sebelahnya lagi ada tempat jemaah LDII. Kami hidup selayaknya penghuni perumahan dengan ragam profesi. Sama sekali tak ada masalah dengan agama. Tapi soal hari raya Hindu memang tak ada yang tahu. Bahkan ketika Nyepi sebagai libur nasional. Saya juga tak mungkin menjelaskan kepada semua tetangga kalau saya akan merayakan Nyepi dan mematikan lampu, apalagi pasang pengumuman depan rumah. Belajar dari pengalaman itu, akhirnya kami hanya mematikan lampu di depan saja, hanya sebagai penanda bahwa kami sedang menjalankan Nyepi. Tampaknya balada ini juga dialami oleh perantau Hindu di kota-kota besar. Mungkin di daerah, seperti

.....

Lampung, Palu, Bolang Mongondow yang satu desa, bahkan satu kecamatan beragama Hindu, Nyepi total bisa dilakukan.

Namun yang menarik selalu saja ada mekanisme dalam budaya untuk tak mengecilkan makna sebuah perayaan agama. Jika aspek ritualnya terasa kering, di luar Bali kami malah bisa mendalami *tattwa* atau filsafat agama melalui kontemplasi di dalam pura. Jadi, umat Hindu, terutama saat Nyepi dan Siwa Ratri pagi-pagi akan ke pura dan esok paginya baru pulang. Sedangkan saat Saraswati, khususnya anak-anak muda sudah meramaikan pura sejak sore hari, dan pulang esok hari setelah *banyu pinaruh*. Semua malam di hari raya itu diisi dengan pembacaan dan pendalaman kitab suci. Di dalam pura itu pula, umat Hindu ada yang melakukan *tapa brata yoga semadi*, bahkan ada juga yang sanggup melaksanakan *upawasa* dan *monabratha*, sesuatu yang sangat jarang bisa dilakukan di Bali. Umat Hindu, apalagi pemuda pemudinya malah hanya meramaikan pantai atau lapangan. Sedikit sekali yang melakukannya di pura, dan mungkin tak perlu belajar agama lagi karena merasa lahir dan besar di mana Hindu menjadi mayoritas di Bali. Mungkin juga karena *seng ada lawan!*



Ongkos mahal merantau: negen duang banjar

Gen kebudayaan akan terus mengikuti ke mana orang Bali merantau. Tentu tak persis sama karena sudah dibaluri budaya baru. Adaptasi untuk bertahan “memaksa” mereka untuk melakukan peniruan, dan bahkan pemantasan diri. Hampir semua berhasil, apalagi saat bertumbuh itu berada dalam komunitas yang sama. Tapi tak jarang ada yang gagal, pulang kampung atau berpindah keyakinan. Tak soal, karena itu sudah menjadi urusan pribadi. Di kota besar seperti Jakarta, hanya mereka yang profesional bisa diterima oleh kerasnya kehidupan, tentu juga yang akan bisa bertahan.

Jangan bayangkan kami semua pekerja kantoran, birokrat atau eksekutif berdasi. Ada banyak perantau yang sukses hanya menjadi *penabuh*, pelatih tari hingga tukang ukir. Karena langka, profesi ini malah mahal harganya. Mengerjakannyapun di perumahan-perumahan elit, macam Pondok Indah atau BSD. Intinya, untuk bisa bertahan mereka harus profesional. Yang tak memiliki *passion*, mereka gagal. Berprofesi apa saja tak soal, yang penting profesional dan berintegritas. Kira-kira begitu kalimat sakti para perantau. Tak heran, penduduk lokal sering

.....

minggir, kalah bersaing dengan perantau dari segala penjuru nusantara.

Namun sehebat apapun profesi yang digeluti, Sabtu dan Minggu, di pura kami adalah orang Bali. Tak ada lagi jarak. Memang, saat *ngorta* akan lebih asyik dengan yang seprofesi, tapi selebihnya kembali menjadi “orang Bali”. Di pura memungkinkan identitas itu kembali ke titik semula. *Be guling, betutu, jukut ares* tersedia. *Tipat cantok, serombotan* juga ada. Berbahasa Bali juga tak masalah. Bahkan tiap bulan arisan baik di pura maupun di rumah salah satu warga itu sudah menjadi kewajiban moral. Bayar urunan di *tempekan* dan *banjar, suka duka*, dlsb adalah cara kami kembali menjadi “orang Bali”. Sedangkan di Bali, kami juga rata-rata masih ikut *me-banjar adat* dan *me-suka duka*. Ketidakhadiran fisik sudah dimaafkan. *Negen duang banjar* di tengah pekerjaan yang menuntut profesionalisme bukan sesuatu yang menyulitkan. Yang menyedihkan malah sering dituduh mulai meninggalkan adat Bali dan *ongkang-ongkang* saja diperantauan. Padahal dengan *negen duang banjar* juga mahal ongkosnya. Adat Bali itu disulitkan akan menjadi sulit, dimudahkan akan menjadi mudah.



.



5

Pembinaan,
Penyadaran,
Pendidikan

“Membangun logika dengan logistic”, mengapa tidak?

Saat ada berita pejabat pusat akan berkunjung, aparat di daerah akan segera menyebarkan informasi agar umat datang. Sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat, tentu ia tak mau menanggung malu kalau acara tersebut kosong melompong. Dengan segala daya, umat Hindu akhirnya *ketog semprong*. Umat Hindu di luar Bali sangat butuh perhatian. Didatangi saja mereka merasa sangat bangga dan merasa dianggap sebagai bagian dari umat Hindu di Indonesia. Bagaimanapun kondisi umat Hindu di luar Bali, kecuali daerah transmigrasi yang sudah berkembang pesat seperti Lampung, Palembang, Palu, Bolang Mongondow, umumnya masih memprihatinkan. Tak usah jauh. Di Jawa sendiri, poros kejayaan Hindu, kondisi umat masih belum membaik, terlebih mereka menghadapi tantangan berat dari umat lainnya. Bahkan di Bali timur, seperti Karangasem, juga sebagian Klungkung, Bangli, Jembrana dan Buleleng, beberapa umat Hindu masih tak senyenyak tidurnya dengan mereka yang ada di Badung dan Denpasar. Jadi, pejabat di pusat sering-seringlah turun ke daerah, hirup keringat umat, rasakan suka dukanya karena kelangsungan hidup umat Hindu di daerah tak bisa diteropong dari pusat-pusat kekuasaan itu.

Namun menyambangi umat Hindu juga perlu klop dengan kebutuhan mereka. Tak bisa hanya memberikan ceramah dan

.....

membagikan buku, apalagi bukunya tebal dan berbahasa sulit. Terlebih ada slogan satire: “*jangan beli, dikasi gratis dan murah saja umat kita tak mau baca!*” Dapat dibayangkan. Umat Hindu yang berduyun dari berbagai pelosok, bahkan ada yang berjam-jam naik turun bukit, atau seharian melewati sungai dan hutan. Setiba di pusat kota, hanya mendengarkan petuah. Usai kegiatan, mungkin ada yang harus menginap karena perjalanan yang jauh. Tenaga, pikiran dan waktu mereka tersita. Belum lagi stress saat berangkat anaknya ada yang sakit atau ada tagihan hutang.

Ceramah, *dharmawacana* atau *dharmatula* itu perlu, sangat perlu karena itu telah menjadi metode pembinaan yang disepakati bersama. Namun jaman sudah mulai banyak berubah. Karena itu metode pembinaan perlu juga dimodifikasi. Misalnya, saat era birokrasi melayani, kenapa tidak langsung bertemu umat, merasakan hidup mereka. Bukan sebaliknya, mereka “dipaksa” hadir. Atau jika tak perlu repot, dibuatkan saja media pembinaan berupa CD, film, animasi, dlsb. Berikutnya, perlu memperbanyak program pemberdayaan ekonomi keumatan. Jadi, ke daerah sambil ceramah dan bagi buku, juga membagikan benih ikan untuk ditenakkan, kambing atau *godel* untuk dikembangbiakkan, pohon produktif untuk ditumbuhkembangkan atau mendirikan perpustakaan mini di pura umum untuk dibaca-baca sepulang bertani. Dengan memberikan insentif seperti itu, kelangsungan hidup mereka akan terus terjaga. Saat kebutuhan perut mulai terpenuhi, mencerdaskan otak dengan *dharmawacana* akan jauh lebih gampang.



Penyuluh, nyuluhin siapa?

Umat Islam memiliki banyak pendakwah andal. Beberapa di antaranya bahkan berlabel selebriti. Mereka dielu-elukan. Syiar agamanya didengarkan seksama. Meski ada mazhab yang kadang membedakannya, intinya penceramah Islam menjadi panutan. Hal yang sama berlaku dalam umat Kristen dan Katolik yang menjadikan kutbah Mingguan sebagai bagian dari ibadah. Para bhiksu dalam Buddha juga hampir sama. Di sekolah Buddhis, peran bhiksu sangat besar. Agak berbeda dengan Hindu.

Dharmawacana, terutama dalam persembahyangan bersama tidak menjadi rujukan penting. Selain diberikan saat umat sudah *nunas tirtha* dan *bija*, yang biasanya membuat suasana sudah tak khidmat lagi, juga materi yang dibawakan kadang tak begitu menarik. Masih ada juga sebagian umat Hindu tidak *openminded* dan seolah mereka merasa digurui oleh pendharmawacana. Umat suka sekali melihat dan mencari tahu siapa yang bicara, mencari latar belakang pendharmawacana, dan sedikit yang mau mendengarkan apa yang diwedarkan.

Selain pembiasaan, yang akhirnya menjadi pembudayaan, memberikan porsi kepada yang berhak untuk memberikan nasehat itu penting dalam ceruk pembinaan umat. Mungkin proses

.....

seseorang menjadi pendharmawacana perlu ditata ulang, misalnya tingkat pengetahuan dan pemahamannya, juga integritas dan perilakunya. Sering jadi lelucon, “*dia yang memberikan dharmawaca, dia juga yang melakukan dosa, mungkin karena dia sudah tahu doa-doa bertobat*”. Memang menjadi pendharmawacana itu berat, baik *sekala* dan *niskala*. Itu sebabnya, untuk menjadi pastor perlu sekolah yang ketat di seminari, atau tak pernah mudah menjadi bhiksu. Mungkin ada adab lain yang seolah menjadi karakter orang Hindu bahwa mereka berkembang sejak jaman Weda tidak berdasarkan figur sentral, sebagaimana umat Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan agung atau Yesus Kristus sebagai panutan umat Nasrani. Figur besar yang memengaruhi alam pikir dan tindakan umat Hindu nyaris tidak ada, mungkin juga tidak diperlukan. Karena itu, tugas penyuluh akan makin berat untuk *nyuluhin* umat.



UDG rasa “Bali”, itu berita lawas bung!

Dalam sebuah sarasehan, beberapa peserta UDG menumpahkan kekecewaannya. Perkaranya bukan karena tak jadi juara. Beberapa *official* kontingen malah bilang *kecele*. Kegiatan nasional yang harusnya mempersatukan umat Hindu malah jadi ajang “permusuhan” dan penuh kompetisi. Beberapa propinsi yang khusus mendatangkan pelatih dari Bali juga tak banyak memberikan pengaruh signifikan. Ujung-ujungnya yang juara tetap kontingen Bali. Begitu kesan yang tertangkap, baik di ruang publik maupun senyap di meja makan saat *break* kegiatan.

Semangat UDG dan kegiatan sejenis yang berlevel nasional, tentu harus didukung. Dengan itu sisi emosi keagamaan kita hendak dibangkitkan. Secara politis pun kita merasa bangga, meskipun hampir semua kegiatan akbar itu mengikuti program dari agama Islam sebagai *pioneer*. Dan agama lainnya mengikuti saja pola itu. Mungkin juga untuk memenuhi keseragaman dalam program pembangunan nasional. Masalahnya, apakah formulasi UDG tidak boleh berubah? Sangat bisa. Ini soal keberanian, soal *good will*. Mari kita kembali pada filosofi UDG, yang adalah upaya pelestarian nilai agama melalui nyanyian, dengan *gegitan*; membangun solidaritas dan representasi kolektif umat Hindu; dan memancarkan hakika ajaran yang terkandung di dalamnya. Tujuan lain tentu masih banyak yang bisa dielaborasi lagi.

.....

Mengingat UDG dilaksanakan dengan format kompetisi, maka ada prestasi yang harus dihargai melalui peringkat. *Nah*, masalah dimulai dari soal ini yang kemudian mengaburkan tujuan utama UDG di atas. Akhirnya tiap propinsi hanya mengejar ranking, selayaknya ajang perlombaan. Padahal, UDG bisa saja hanya sebuah festival atau karnaval kebudayaan tanpa “saling sikut” antarpropinsi.

Agar tercermin bahwa pembinaan agama telah berlangsung, peserta terbaik dari UDG Tingkat Propinsi bisa ditampilkan melalui format eksibisi nasional. Darimana peserta terbaik itu? UDG Tingkat Propinsi harus dilakukan namun dengan kriteria yang mengakomodasi lokalitas. Misalnya, UDG Jawa Tengah menggunakan langgam Jawa. Orang Bali yang ada di Jawa Tengah, dengan konsep *desa-kala-patra*, mengikutinya. Begitu juga dengan daerah lainnya. Kalaupun di UDG Lampung menggunakan langgam Bali yang karena orang Bali dominan di daerah itu, tetap harus memberikan ruang *gegitaan* ala orang Bali di Lampung. Masalahnya, standar penilaian hanya menggunakan langgam Bali, dan orang non Bali juga harus menggunakan langgam Bali. Dengan format UDG tingkat propinsi seperti itu, pemda akan ikut merasakan manfaatnya dan mendukung kegiatan ini untuk dimasukkan dalam APBD, *political will* yang sampai hari ini belum terjadi, kecuali lagi-lagi, hanya untuk UDG Tingkat Propinsi Bali, *tok*. Dan terpenting, para juara di UDG Tingkat Propinsi diberdayakan menjadi *dharmaduta* di daerahnya masing-masing, bukan “habis sepah manis dibuang”.



Katanya desa-kala-patra, tapi kok saklek?

Jika jalan-jalan ke Jawa, banyak sekali ada pura, padahal di daerah itu umat Hindu dari Bali minoritas. Beberapa candi yang merupakan tempat suci umat Hindu Jawa sudah banyak yang berubah. Padahal mungkin mereka jauh lebih nyaman sembahyang di depan candi dan menggunakan pakaian adat Jawa, lengkap dengan blangkon dan doa-doa berbahasa Jawa. Mereka mungkin tak berdaya karena Hindu Jawa itu distigma minoritas tinimbang umat Hindu Bali. Ada semacam dominasi dan hegemoni internal juga. Bahkan di Semeru, Jawa Timur ada yang protes kalau *banten*, *pemangku* dan *panditanya* seperti “diimpor” semua dari Bali. Umat Hindu lokal hanya menonton, paling *banter* ikut *ngayah* bersih-bersih. Berbeda kasus dengan umat Hindu Bali di daerah transmigrasi yang diisi mayoritas, bahkan semuanya dari Bali.

Padahal, salah satu yang membuat Hindu sampai saat ini bisa bertahan adalah kearifan *desa-kala-patra*. Mereka lentur bisa hidup di mana saja mengikuti adab dan budaya lokal. Karena itu menjadi aneh jika umat Hindu di luar Bali malah memaksakan adab Bali-nya. Mereka mendominasi dan menghegemoni dengan

.....

standar bersama yang diciptakan. Jika cita rasa itu tak sesuai dengan standar Bali, maka dianggap salah.

Jika merunut kembali masuknya Hindu ke nusantara yang dengan elok mempermulia budaya lokal, itu adalah penanda kearifan *desa-kala-patra* telah bekerja dengan baik. Jika memaksakan adab Bali di luar Bali apalagi umat Hindu lokal, menjadi kontradiktif dengan ruh kearifan itu. Seharusnya, Hindu tetap dan terus mempermulia budaya-budaya lokal di mana mereka tumbuh. Esensi dan *tattwa* dari setiap fitur keagamaan itu yang harus terus selaras dengan kitab suci. Umat Hindu harus dibiarkan tumbuh bersama budaya Aceh hingga Papua. Agar bisa terus enak hidup di tanah orang. Artinya, Hindu juga harus ikut menggarami tanah-tanah yang hambar itu.



“Pendidikan hati”, pergilah ke alam!

Seorang teman sepulang dari Jepang bercerita, kalau anak SD hingga kelas 2 tidak dipaksa belajar berhitung apalagi menghafal. Saya mempercayainya setelah membaca beberapa referensi termasuk rekam jejak karakter negeri Samurái ini. Dalam tiap sesi belajar, mereka sering dibuatkan group yang berbeda-beda, dengan tematik yang juga berbeda. Obyek belajarnya alam dan lingkungan. Hebatnya, karena berkelompok, semua orang akhirnya punya pengalaman yang sama. Misalnya, saat belajar binatang, masing-masing orang diminta mencari satu binatang yang ditemukan di sawah. Selepas itu mereka harus menceritakan kepada temannya di depan kelas. Siswa yang tidak mendapat tugas mencari cacing akan tahu dari cerita temannya. Begitu juga yang tidak mendapat tugas mencari kodok, capung, belut, dlsb.

Apa pelajarannya? Pertama, mereka belajar untuk hidup bersama, saling mengenal dalam kelompok, sehingga tidak menjadi manusia asosial. Kedua, saling mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dari masing-masing tugas yang berbeda. Satu sesi belajar bisa menghasilkan beragam sumber. Ketiga, belajar pada hal yang nyata, melihat dan merasakan langsung realitas

.....

yang dipelajari. Keempat, semua orang menjadi pendengar dan sekaligus pembicara yang baik. Kelima, menumbuhkan kepercayaan diri, karakter kuat dan etos sejak usia dini.

Metode belajar ini sebenarnya mirip-mirip Bhagawan Domya menerapkannya kepada tiga murid terpilihnya: Sang Utamanya, Sang Weda dan Sang Arunika. Mereka belajar di alam, dan menceritakan kembali kepada sang bhagawan. Ada refleksi di dalamnya. Kini, nuansa seperti ini mulai memudar. Anak-anak kita lebih banyak mendapatkan teori, konsep dan ajaran yang abstrak. Misalnya, saat menceritakan sapi, mereka selalu diberikan informasi kalau sapi itu binatang bertanduk, berkaki empat dan bau. Begitu berulang-ulang tanpa pernah diajak melihat langsung sapi itu seperti apa. Tak heran, jika melihat kambing, biri-biri, atau rusa, anak-anak ini membilang itu sapi hanya karena di memorinya tergambar sapi adalah binatang berkaki empat, bertanduk dan bau. Saat jalan-jalan, beberapa pegawai kebun binatang menggunakan tanduk-tandukan dan berjalan sedikit membungkuk-bungkuk, juga akan dipanggil sapi.



Agar mendidik tak gersang, mesatualah!

Story telling adalah salah satu metode belajar. Tak kalah bagus dengan ceramah, bermain peran, simulasi, dlsb. Karena itu, metode *story telling* sangat penting apalagi untuk anak-anak. Bahkan belajar agama, terlebih bagi yang awam, perlu memulainya dengan cerita, epos, Itihasa, atau Purana. Gambaran sebuah peristiwa imajinatif bisa seolah hidup dalam kenyataan. Tentu memindahkan yang abstrak menjadi konkret bukan perkara mudah, sesulit membuat buku sederhana bagi mereka yang awam. Biasanya mudah membuat buku yang sulit, apalagi hanya dimengerti oleh penulisnya sendiri.

Dalam Hindu, luar biasa banyak *satua* yang bisa dijadikan sumber belajar. Sayangnya tradisi ini tak banyak dieksplorasi para pendidik. Mereka terlalu asyik dengan buku teks, lalu merasa berdosa jika satu bab materi tak diajarkan kepada siswa. Kemampuan lain yang tak banyak dimiliki para pendidik itu adalah mengkontekstualisasikan isi *satua* pada kehidupan masa kini. Tak hanya menawarkan romantisme masa lalu, apalagi bernostalgia saja.

Satua itu adalah folklore yang hidup di tengah masyarakat. *Satua* juga adalah cerita tentang kehidupan, yang isinya bisa saja lawas meski panggungnya anyar. Katakanlah Mahabharata yang



berhasil menggambarkan lakon kehidupan yang dari dulu hingga kini sama, tentang kebaikan melawan kejahatan. Dari dulu ada Sengkuni, kini pun banyak Sengkuni di sekitar kita. Belajar dari *satua* bukan sekadar teks-teksnya yang bisa saja mati, tapi konteksnya akan terus hidup. Sebagaimana Walmiki menyebut roman Rama dan Sinta akan abadi sepanjang gunung berdiri tegak dan air sungai mengalir. Namun bukan berarti teks tak diperlukan. Dialektika antara teks dan konteks itulah pendidik harus hadir untuk menyampaikan pesan sebuah cerita. Misalnya, teks tentang Lubdaka memang mengisahkan dia berburu ke hutan, begadang dan memetik daun bilwa, tapi konteksnya bisa saja siapa yang sadar dalam keadaan yang tepat, disiplin dan bekerja keras, dia akan digaransi memperoleh pengharapan terakhirnya, seperti Lubdaka mendapatkan surga.



Mengukur kompetensi jangan kepada I Belog dong!

Kata kompetensi sudah mengakrabi kita cukup lama, terlebih saat KBK diterapkan awal 2000an. Sayangnya rumusan kata ini banyak yang tak dipahami para pendidik. Jika pelajaran atau matakuliah usai, mereka merasa kompetensi mahasiswa akan meningkat. Bahkan ukurannya kadang terlalu positivistik ketika mereka mampu menjawab soal-soal yang tagihannya lebih banyak pada aspek kognitif. Padahal kini kemampuan manusia sudah memasuki era yang kompleks. Multi-kecerdasasan saja sudah diperbaharui dengan menambahkan kecerdasan naturalistik.

Secara sederhana, kompetensi itu seperti kemampuan penting dalam diri yang bisa digunakan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Bukan seperti *satua* I Belog yang tidak memiliki kemampuan untuk memilah, memilih, dan menentukan. Sehingga ketika pesan ibunya untuk membeli bebek yang berat, ia lalu timbang di sungai dengan asumsi jika bebek itu berat tentu akan tenggelam. Yang terjadi sebaliknya, uang dan bebek raib. Memang I Belog adalah sosok polos dan naif. Tak selamanya

.....

jelek tentu saja, karena Bhima juga naif ketika mau saja pergi ke tengah samudera, padahal itu tipu muslihat Bhagawan Drona untuk menenggelamkannya. Dengan keluguannya, Bhima malah bertemu Dewa Ruci dan mendapatkan anugrah tirtha kamandalu.

Contoh lain untuk menyederhanakan istilah kompetensi adalah ketika seorang pemancing mendapat *be julit* yang panjangnya 1 meter. Ia girang tak kepalang, lalu mengabarkan ke semua orang di kampungnya dan minta dipinjamkan penggorengan yang lebarnya 1 meter. Permintaannya sia-sia karena tak satupun warga memiliki penggorengan berdiameter 1 meter. *Nah*, jika pemancing ini punya kompetensi, ia akan memotong *be julit* itu sesuai keinginannya, dan akan memasak apa. Sesekali murid perlu diajak pergi ke Padmasana untuk melihat dan menceritakan pemutaran gunung Mandara Giri karena terdapat garuda, naga, bedawang nala, dlsb. Ajaklah mereka menikmati proses belajarnya dengan gembira, bukan dengan tekanan dan beban. Kompetensi akan muncul dari proses bukan hasil semata. “*The end of education is character*”, bukankah ini kalimat sakti para pendidik



Orang kampus alergi diskusi, gak asyik ah!

Eksistensialisme dalam filsafat, amat digandrungi kalangan eksistensialis—dan makin populer ketika “dituduh” menginspirasi kelahiran komunisme—adalah salah satu konsep besar yang ditemukan filsuf Paul Sartre di jalanan kota Paris, Perancis. Ia bersama beberapa karibnya kerap nongkrong dari satu café ke café lainnya. Ternyata, banyak teori besar juga ditemukan dengan cara sederhana dan remeh seperti ini. Sebut saja hukum Archimedes, hukum Newton tentang gravitasi, dan bahkan beberapa temuan besar dihasilkan dengan tak disengaja.

Memang dalam arus besar intelektual dunia, ada juga lingkaran studi yang sangat serius, misalnya di Jerman ada Mazhab Frankfurt yang memproduksi teori kritis atau jauh sebelumnya ada Viena Circle di Swiss yang salah satunya menghasilkan teori falsifikasi. Meski berbeda cara, esensinya tetap sama: ada energi besar untuk membuka ruang dialog, diskusi, debat dan silang pendapat.

.....

Dalam Hindu juga dikenal Tarkawada. Para rsi di masa lalu menggunakan metode ini untuk menghasilkan kebenaran sejati dengan cara dialog hingga debat. Upanishad dan kitab-kitab. Darsana lahir dengan cara ini. Sayangnya tradisi ini tidak lantas menjadi satu metode yang familiar dikalangan akademisi Hindu. Padahal dengan diskusi, kita akan bisa, pertama, mendapatkan banyak asupan materi pada otak. Kedua, mendapat pengalaman baru, dan sensitif dengan isu-isu aktual. Ketiga, belajar menerima pendapat dari orang yang berbeda sekalipun. Keempat, belajar mendengar, mengendalikan emosi, dan mematangkan pengalaman. Akademisi Hindu saat ini masih ada yang alergi dengan dialog, sedangkan para rsi di masa lalu malah sudah serius berdebat. Ironi, dan *gak asyik*.



Penelitian kampus, dunia abu-abu?

Dalam beberapa kesempatan diskusi maupun seminar masalah penelitian, saya selalu bilang bahwa setiap penelitian harus dipublikasikan. *Kok?* Sekurangnya ada lima alasan, pertama, pemerintah sedang giat membangkitkan literasi dan publikasi ilmiah yang dirasakan masih rendah, kalah jauh dari negara tetangga, salah duanya Malaysia dan Singapura, padahal jumlah dosen kita jauh lebih banyak. Soal ini bisa dicek mudah. Kedua, dunia akademis sedang memasuki perubahan besar, dari cetak ke digital, online, elektronik. Harusnya kini makin mudah. Ketiga, jika penelitian dosen adalah hibah dari APBN, rakyat berhak tahu apakah anggaran yang berasal dari pajak rakyat itu sudah digunakan dengan baik, dan terutama apakah ada keluarannya. Keempat, sebagai tanggungjawab ilmiah dan etika akademik, publikasi diperlukan untuk menjawab masalah yang ditemukan. Kelima, untuk menunjukkan kualitas penelitian.

Mungkin ada benarnya, penelitian dunia kampus ada yang tidak memberikan solusi, apalagi menyelesaikan masalah di masyarakat. Dengan kritik ini, lagi-lagi, membenarkan dunia kampus terlalu berjarak dengan kenyataan, dengan masyarakat.

Bagaimana tidak. Jangankan dipublikasikan dalam bentuk berbagai media, seperti buku, monograf, prosiding atau jurnal,



banyak juga laporan penelitian tidak disimpan di perpustakaan, atau sudah tersimpan tetapi banyak yang rusak karena dimakan rayap dan debu. Jarang yang membaca, alih-alih dijadikan rujukan. Masalahnya, APBN untuk hibah penelitian itu besar, dan makin besar di masa mendatang seiring bergairahnya dunia literasi kita. Bagaimana dengan minimal lima alasan di atas? Absurd.





Purnawacana

Bali adalah tempat di mana yang rasional dan irasional bisa saling bertukar, bermutasi. Tentu bisa juga menyatu dalam satu tungku. Berbeda sekaligus sama, di dalam sekaligus di luar. Standar bersama diciptakan melalui konsensus, bukan segera mengabadikan, tetapi mengujinya dengan tuas pragmatisme. Dengan itu, Bali akan selalu terbuka menerima anasir asing, yang tak paham menyebutnya permisif. Padahal dalam keberterimaannya itu sekaligus terdapat mekanisme uji internal, jika laik diteruskan, jika gagal memenuhi standar bersama, akan ditinggalkan. Sederhana itu, sebenarnya. Tak aneh, jika tren dalam budaya pop sekalipun juga tetap dijabat tangan, bahkan dalam rangka memenuhi urusan ritual sakral.

Dan sebagai masyarakat berciri agraris, budaya komunal terasa kental. Karena itu, di manapun orang Bali berdiam, hidup kolektif akan menjadi pilihan, bukan eksklusif karena *kesepekang* akan menanti. Pergi ke pura saat *odalan* juga demi dan untuk kolektivitas itu. Jangan kaget, di luar Bali hingga ke luar negeri, kekerabatan menebal betul, meskipun celah rapuh juga menganga, misalnya karena soal primordial. Tak apalah, dengan itu juga karakteristik budaya Bali tetap lestari. Tak salah, pura juga multifungsi, misalnya untuk mencari jodoh, setidaknya jangan sampai *paid bangkung*.

.....

Sayangnya memang, Bali kini mulai banyak berubah, yang beberapa di antaranya malah kontraproduktif. Pariwisata misalnya, meskipun isu ini bukan barang baru, tetap saja ada kegagalan, terutama membenahi mentalitas “orang dalam”. Di alam demokrasi, dengan diberlakukannya otonomi daerah, kita tetap tak boleh mengumpat apalagi mengusir pendatang, karena yang harus juga dilakukan adalah otokritik. Mengapa masih ada orang Bali yang miskin dan bodoh? *Dus*, bagaimana *positioning* kita terhadap sergapan *shifting* dan *disruption*, yang mau tak mau, harus dilakoni. Padahal efek Foucauldian juga sedang menjangkiti kehidupan post-modern kita, ketika kekuasaan sudah menyebar dan tidak ada kuasa tunggal, semua sudah mulai terbagi. Klaim pribumi dan urban juga mulai tak laku lagi. Bahkan selera hidup kini sudah dikendalikan android, yang siapa pengendalinya, tetap tak jelas. Tapi yang tak berubah, kita di Bali tetap dapat menikmati dua dunia sekaligus: *sekala-niskala*, modern-tradisional. Mengapa, karena kebudayaan





Senerai Bacaan

Arsana, I Gusti Ketut Gde., dkk. 1986. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Bali*. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali.

Artadi, I Ketut. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post. Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Bagus, I Gusti Ngurah. 2004. *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar: Kajian Budaya Books. Bateson, Gregory. 1972. *Steps to an Ecology of Mind, Balinese Ethos*. Collected Essay in Anthropology, Psychiatry and Epistemology. University of Chicago Press.

Belo, Jean. 1970. *Traditional Balinese Culture*. New York, London: Columbia University Press.

Boon, James A. 1977. *Anthropological Romance of Bali 1597-1972, Dynamic in Marriage and Caste Politics and Religion*. Cambridge: Cambridge University Press.

-
- Bruner, Edward. 1986. *Experience and Its Expressions* dalam Bruner (ed) *The Anthropology of Experience*. Chicago: University of Illinois.
- Covarrubias, M. 1937. *Island of Bali*. New York: A. Knoff Inc.
- Dharma Putra, I Nyoman. 2007. *Wanita Bali Tempo Doeloe, Perspektif Masa Kini*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Durkheim, Emile. 1976 (1912). *The Elementary Forms of The Religious Life*. George Allen & Unwin Ltd.
- Eiseman, Jr., Fred B. 1989. *Bali Sekala & Niskala*. Berkeley, California.
- Frederich, R. 1959 (1849). *The Civilization and Culture of Bali*. Calcuta: Susil Gupta Private Ltd.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. London, Hutchinson & CO Publisher LTD (*The Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture* [1973a]; *Religion as a Cultural System in Interpretation of Cultures* [1973b]; *Person, Time and Conduct in Bali in Inter-pretation of Cultures* [1973c]).
- Hobart, Ramseyer & Leeman. 1996. *The People of Bali*. Blackwell Publisher, UK.
- Hofstede, Geert.
- Howe, Leo. 1995. *Status Mobility In Contemporary Bali: Continuities and Change*. Jakarta: Center For South-East Asian Studies.

-
- Koentjaraningrat (ed). 2007. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lansing, J. Stephen. 1983. *The Three Worlds of Bali*. Praeger, New York.
- Lansing, J. Stephen. 2006. *Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali*. Princeton University Press.
- Mantra, IB. 1990. *Bali Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra.
- Mantra, IB. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Naradha, Satria ABG. 2004. *Ajeg Bali Sebuah Cita-Cita*. Denpasar: Bali Post.
- Notiasa, I Wayan. 2005. *Pemunculan Sistem Soroh dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Bali Aga (Studi Kasus di Desa Pakraman Sidatapa, Banjar, Buleleng, Bali)*. Tesis. Denpasar: Program Pascasarjana Univ. Hindu Indonesia.
- Peursen, C. A. van. 1992. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Terjm. Jean Couteau dan Warih Wisatsana dari *Bali: Tourism Culturel et culture touristique*, 1992. Jakarta: Forum Jakarta-Paris.



- Robinson, Geoffrey. 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*
- Terjm. Arif B. Prasetyo dari *The Dark Side of Paradise; Political Violence in Bali*. Yogyakarta: LKiS
- Soethama, Gde Aryantha. 2003. *Bali is Bali*. Denpasar: Arti Foundation
- Soethama, Gde Aryantha. 2004. *Basa Basi Bali*. Denpasar: Arti Foundation
- Soethama, Gde Aryantha. 2006. *Bolak Balik Bali*. Denpasar: Arti Foundation
- Sudharta, Tjok Rai. 2006. *Manusia Hindu: Dari Kandungan Sampai Perkawinan*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Suryani, Luh Ketut, 2003. *Perempuan Bali Kini*. Denpasar: Penerbit BP.
- Wiana, I Ketut. 2004. *Mengapa Bali disebut Bali?* Surabaya: Paramita.
- Yuga, Ibed Surgana. 2008. *Bali Tanpa Bali*. Denpasar: Panakom.
- W. van Hove. *Bali, Studies in Life, Thought and Ritual*. Selected Studies on Indonesia, Vol. 5. The Hague & Bandung, 1960. 368 hlm.



Tentang Penulis

Nyoman Yoga Segara, lahir di Serangan, Denpasar. Menyelesaikan S1 Sastra dan Filsafat Agama, Universitas Hindu Indonesia (1998); S2 Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia (2004); S3 Antropologi, Universitas Indonesia (2011), dan *Post-Doctoral* di Leiden University, Netherland (2012). Mengawali karir PNS di Kementerian Agama RI sejak 1999. Selain sempat menjadi Wakil Ketua I (2007-2016) dan Dosen Tetap Yayasan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara (STAHDN) Jakarta (2000-2015), juga mengajar di Universitas Atmajaya (2006-2010), Binus University (2006-2010), dan Universitas Mercu Buana (2007-2010). Pernah menjadi Widyaiswara di Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Peneliti di Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat (2006-2015). Sejak 2016 menjadi Dosen di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar dengan konsentrasi Antropologi Budaya. Kini bermukim di Pulau Serangan dengan kontak e-mail: yogasegara@yahoo.com



CALEP

catatan lepas kebudayaan

I Nyoman Yoga Segara

sepotong bukanlah potongan
seperti selepas tak seringan kapas
karena sepotong adalah kata
yang digiring menjadi makna
dilepas dengan kerumunan logika
etika, estetika, bersama diksi
premis, sintesa antitesa

maka catatan lepas seperti
potongan kata yang dibaluri
patos, mithos, locos dan logos
menjadi silang kayu ditungku
menanak masalah dan peluang
menjadi jawaban yang disuguhkan
dalam cawan pustaka



wartam plus

www.wartammu.com